

LAPORAN

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2007



Diterbitkan : Desember 2007

Data : Oktober 2006 – Oktober 2007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



BUPATIT ANAH BUMBU

Alamat Kantor : Jl. Dharma Praja No. 01 Batulicin Kalimantan Selatan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikanNya sehingga Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 dapat di selesaikan dengan baik

Guna mengantisipasi sejauh mana dampak pembangunan berpengaruh terhadap komponen lingkungan hidup maka dihimpun berupa data dan informasi lingkungan hidup yang memberikan gambaran seobyektif mungkin baik terhadap dampak kegiatan manusia (Sosial Ekonomi) maupun pengaruh peristiwa alam terhadap komponen kependudukan dan lingkungan hidup dalam jangka satu tahun.

Kami menyadari bahwa Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tanah Bumbu ini belum sepenuhnya lengkap dan maksimal, serta masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempumaan Laporan yang akan datang

Diharapkan dengan adanya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Tanah Bumbu ini dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas gagasan, wawasan dan pemahaman dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang.

Batulicin, Nopember 2007

BUPATI TANAH BUMBU,

ZAIRULLAH AZHAR

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
PETA WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU	vii
ABSTRAK	I
A. Ringkasan Isu Lingkungan Utama Lingkungan Hidup	I
B. Ringkasan Kebijakan Pembangunan Daerah Berkelanjutan	I
C. Ringkasan Agenda Pengelolaan Lingkungan Hidup	II
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Maksud dan Tujuan	I-1
1.2 Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu	
1.2.1 Visi Kabupaten Tanah Bumbu	I-2
1.2.2 Misi Kabupaten Tanah Bumbu	I-2
1.3 Gambaran Umum	
1.3.1 Kondisi Geografis, Demografis, Geologi, Tata Ruang, Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu	I-3
1.3.2 Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	I-6
A. Arah Kebijakan	I-6
B. Sasaran Kebijakan	I-8
1.3.3 Kebijakan Tata Ruang	
A. Arah Kebijakan	I-9
B. Sasaran Kebijakan	I-9
1.3.4 Kebijakan Sosial, Ekonomi dan Budaya	
A. Sosial	I-9
B. Ekonomi	I-10
C. Budaya	I-11
BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2007	II-1
BAB III AIR	III-1
3.1 Kondisi Sumber Daya Air	III-1
1 Kondisi Kuantitas Air	III-1
2 Kondisi Kualitas Air	III-2
3.2 Penyebab Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air	III-11
3.3 Dampak terhadap Kuantitas dan Kualitas Air	III-12
3.4 Respon dan Kebijakan Yang Diambil	III-14
BAB IV UDARA	IV-1
4.1 Kondisi Udara	IV-1
4.2 Penyebab Menurunnya Kualitas Udara	IV-2
4.3 Dampak Terhadap Penurunan Kualitas Udara	IV-2
4.4 Respon dan Kebijakan yang diambil	IV-6

BAB V	LAHAN DAN HUTAN	V-1
	5.1 Kondisi Lahan dan Hutan	V-1
	5.2 Penyebab Kerusakan Lahan dan Hutan	V-1
	5.3 Dampak Lingkungan yang Terjadi	V-3
	5.4 Respon dan Kebijakan yang diambil	V-5
BAB VI	KEANEKARAGAMAN HAYATI	VI-1
	6.1 Kondisi Keaneekaragaman Hayati	VI-1
	6.2 Penyebab Menurunnya Kelestarian Keaneekaragaman Hayati	VI-2
	6.3 Dampak Terhadap Flora dan Fauna	VI-2
	6.4 Respon dan Kebijakan yang diambil	VI-3
BAB VII	PESISIR DAN LAUT	
	7.1 Kondisi Umum Pesisir dan Laut Kabupaten Tanah Bumbu	VII-1
	7.2 Penyebab Kerusakan dan Pencemaran Wilayah Laut dan Pesisir	VII-2
	7.3 Dampak Terhadap Lingkungan Laut Dan Pesisir	VII-3
	7.4 Respon dan Kebijakan yang diambil	VII-4
BAB VIII	AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	VIII-1
	DAFTAR PUSTAKA	viii

DAFTAR TABEL

	Judul/Uraian Tabel	Halaman
Tabel 3.1	Data Sampel Air Sungai Kusan	III-5
Tabel 3.2	Hasil Analisa Kualitas Air Sungai Kusan	III-3
Tabel 3.3	Data Sampel Air Sungai Satui	III-3
Tabel 3.4	Hasil Analisa Kualitas Air Sungai Satui	III-4
Tabel 3.5	Data Sampel Air Sungai Batulicin	III-4
Tabel 3.6	Hasil Analisa Kualitas Air Sungai Batulicin	III-5
Tabel 3.7	Data Analisa Kualitas Air pada Hulu Sungai Ata Km 62 PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin	III-6
Tabel 3.8	Data Analisa Kualitas Air pada Hilir Sungai Ata Km 50 PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin	III-7
Tabel 3.9	Data Analisa Kualitas Air pada Hulu Sungai Sela PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin	III-7
Tabel 3.10	Data Analisa Kualitas Air Hilir Sungai Sela PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin	III-8
Tabel 3.11	Data Analisa Kualitas Air di depan Pelabuhan CK PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin	III-8
Tabel 3.12	Data Analisa Kualitas Air di depan Pelabuhan Kodeco PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin	III-9
Tabel 4.1	Hasil pengukuran dan analisa kualitas udara di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006	IV-4
Tabel 4.2	Hasil pengukuran tingkat kebiusangan pada kawasan Industri di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006	IV-4
Tabel 4.3	Hasil pengukuran tingkat kebiusangan pada kawasan Perumahan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006	IV-5
Tabel 5.1	Tingkat Kekritisian Hutan dan Lahan di Kabupaten Tanah Bumbu	V-3
Tabel 5.2	Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus– Dana Reboisasi (DAK-DR) Tahun Anggaran 2006 – 2007	V-6
Tabel 5.3	Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2006-2007	V-7

Tabel 7.1	Kependudukan di Laut dan Pesisir	VII-1
Tabel 7.2	Tabel Abrasi dan Reklamasi	VII-3

DAFTAR GAMBAR

	Judul/Uraian Gambar	Halaman
Gambar 1	Kondisi Sumber Daya Air DAS Kusan dan Satui	III-14
Gambar 2	Pengambilan Sampel Air I	III-15
Gambar 3	Pengambilan Sampel Air II	III-15
Gambar 4	Kondisi peningkatan kadar debu di lokasi tambang PT. Arutmin Indonesia Site Satui	IV-5
Gambar 5	Penumpukan material batubara pada lokasi tambang PT. Dua Sahabat Jaya, Satui	IV-5
Gambar 6	Kondisi Lahan Terganggu Akibat Aktivitas Tambang	V-4
Gambar 7	Pembibitan Sengon Untuk Kegiatan Penghijauan	V-8

ABSTRAK

A RINGKASAN ISU UTAMA LINGKUNGAN HIDUP

1. Penurunan Kualitas Lingkungan
 - a. Penurunan kualitas dan kuantitas air
 - b. Penurunan kualitas udara
 - c. Kerusakan lingkungan fisik
 - d. Kerusakan Pesisir, Laut dan Hutan Mangrove
 - e. Penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan.
2. Manajemen Pengelolaan
 - a. Perlunya reaktualisasi bahwa Tata Ruang sebagai acuan pembangunan Wilayah
 - b. SDM pengelola yang belum merata kemampuan dan pengetahuan teknis dan managerial dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - c. Kepedulian dan peran serta masyarakat yang belum memadai
 - d. Keterbatasan dana pembinaan, pengawasan dan pemulihan
 - e. Kurangnya data indikator lingkungan dan data dasar AMDAL/ UKL-UPL.

B RINGKASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN

1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk 5 tahun ke depan diarahkan pada 4 kebijakan antara lain : peningkatan dan pengembangan sumberdaya manusia dan kapasitas kelembagaan, mempersiapkan pranata hukum lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, peningkatan peran serta stock holder an pengelolaan lingkungan hidup daerah serta pengendalian sumberdaya alam

2. Kebijakan Tata Ruang

Tata ruang telah direncanakan secara global seperti penetapan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditetapkan di Gunung Tinggi, Pagatan sebagai daerah wisata budaya dan pendidikan, Batulicin sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri dengan dukungan pelabuhan samudra Batulicin, rencana pembuatan lapangan terbang dan

Sekolah Tinggi Tanah Bumbu di wilayah Sungai Loban, termasuk penataan dan pelestarian wilayah pertanian, perkebunan dan pertambangan dengan reklamasinya.

3. Kebijakan Sosial, Ekonomi Dan Budaya meliputi peningkatan kesejahteraan rakyat

Peningkatan kesejahteraan sosial adalah upaya meningkatkan kesejahteraan warga dengan melalui pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sedangkan pembangunan kebudayaan diarahkan pada pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai – nilai luhur kepribadian masyarakat. Revitalisasi nilai kearifan masyarakat Tanah Bumbu sebagai salah satu dasar pengembangan etika pergaulan sosial untuk memperkuat identitas nasional.

C. RINGKASAN AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Tanah Bumbu serta berbagai komponen usaha dan masyarakat berusaha melakukan upaya pengendalian dampak negatif dari aktifitas masyarakat dan pembangunan yaitu dengan melaksanakan program-program berikut :

1. Program rehabilitasi hutan lahan
2. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Program pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan
4. Program pengelolaan limbah
5. Program pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup daerah
6. Program pengawasan, pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup

BAB I PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 untuk memberikan gambaran dan informasi seobyektif mungkin kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu dengan memuat data – data aktual tahun 2006 - 2007 seperti ketersediaan sumber daya alam, dan usaha pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

Tujuan penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 ini adalah :

1. Menyediakan fondasi yang handal berupa data, informasi dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah
2. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik
3. Menyediakan sumber informasi utama bagi Rencana Program Pembangunan Daerah, Pembangunan Tahunan Daerah dan Kepentingan Penanaman Modal
4. Meningkatkan informasi lingkungan hidup sebagai sarana publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian pelaksanaan Tata Praja Lingkungan (Good Environmental Governance) di Daerah, sebagai landasan publik untuk berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Bangun Praja) bersama – sama dengan lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta sebagai sarana pendidikan untuk peningkatan kesadaran publik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

1.2. VISI DAN MISI KABUPATEN TANAH BUMBU

1.2.1. Visi Kabupaten Tanah Bumbu

Terwujudnya Tanah Bumbu sebagai Kabupaten Multipotensi dan Multiprospek, Bersatu, Maju, Mandiri, Agamis, Menuju Masyarakat Madani.

1.2.2. Misi Kabupaten Tanah Bumbu

- a. Terbentuknya pusat pemerintahan baru guna mempermudah koordinasi dan memperlancar pelayanan masyarakat
- b. Penataan dan pemberdayaan institusi yang ada baik di lingkungan pemerintah maupun lembaga – lembaga yang ada di lingkungan masyarakat
- c. Penegakan supremasi hukum, menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat
- d. Peningkatan kualitas SDM dan kesehatan
- e. Terciptanya pemerintah yang baik dengan meningkatkan hubungan kerjasama antara pemerintah, masyarakat serta dunia usaha
- f. Penggalakan partisipasi masyarakat di segala bidang kehidupan, baik dalam pelaksanaan, pemeliharaan dan pengawasan dalam pemerintahan dan pembangunan
- g. Peningkatan kemampuan ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana serta kebijakan yang mampu mendorong dan menumbuhkembangkan investasi di bidang jasa, perdagangan dan industri yang ramah lingkungan dengan dilandasi oleh semangat ekonomi kerakyatan
- h. Peningkatan kualitas pemukiman yang layak huni, representative dan berwawasan lingkungan menuju masyarakat sehat sejahtera dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- i. Peningkatan kemampuan Pemerintahan Kabupaten sebagai daerah otonom dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk mewujudkan prospek Kabupaten Tanah Bumbu di masa mendatang.

1.3. GAMBARAN UMUM

1.3.1. Kondisi Geografis, Demografis, Geologi, Tata Ruang, Kependudukan dan Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotabaru berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan maka secara formal Kabupaten Tanah Bumbu lahir dan tidak lagi merupakan bagian dari Kabupaten Kotabaru.

Secara geografis terletak antara 2°52' – 3°47' LS dan 115°15' – 116°4' dengan luas wilayah 5.066,96 Km² atau 13,56 % dari luas Propinsi Kalimantan Selatan dengan batas -batas wilayah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kotabaru
- Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru
- Sebelah Selatan : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Tanah Laut dan Kab. Banjar

Ditinjau dari segi administrasi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terbagi dalam 10 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 120 Desa :

- Kec. Kusan Hilir : 1 Kelurahan dan 34 Desa (402,54 Km²)
- Kec. Satui : 12 Desa (867,02 Km²)
- Kec. Kusan Hulu : 20 Desa (1697,42 Km²)
- Kec. Batulicin : 5 Desa (117,71 Km²)
- Kec. Simpang Empat : 5 Desa (331,42 Km²)
- Kec. Sei Loban : 12 Desa (316,91 Km²)
- Kec. Angsana : 7 Desa (152,15 Km²)
- Kec. Kuranji : 6 Desa (60,6 Km²)
- Kec. Karang Bintang : 8 Desa (106,02 Km²)
- Kec. Mentewe : 10 Desa (1015,71 Km²)

Kondisi iklim dikelompokkan sebagai *Afaw* yaitu iklim *isothermal* hujan tropis dengan musim kemarau yang panas. Suhu berkisar dari 23,1° – 34,6° Celcius Suhu tertinggi terjadi pada bulan November dan terendah terjadi pada bulan September. Curah hujan terendah 0 mm terjadi bulan Agustus, dan tertinggi di bulan Juni dengan curah hujan mencapai 98 mm.

Ketinggian tempat bervariasi antara 0 – 1000 meter di atas permukaan laut, namun secara umum wilayah Kabupaten Tanah Bumbu berada pada ketinggian 25 –100 meter di atas permukaan laut.

Struktur Geologi Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari jenis batuan endapan permukaan, Formasi Dahor, Formasi Warukin, Formasi Berai, Formasi Pamaluan, Formasi Tanjung, Formasi Manunggal, Anggota Paa Manunggal, Formasi Pitap, Anggota Haruyan, Batuan Ultramatik dan batuan Malihan. Formasi Tanjung merupakan formasi yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Jenis tanah beragam dari Podsolik, Komplek PMK laterit lithosol lathosol, Podsol, Renzina, Lathosol dan Lithosol.

Sungai Utama yang ada di Tanah Bumbu terdiri dari 8 Sungai yaitu : Sungai Batulicin, Sungai Kusan, Sungai Satui, Sungai Sebamban, Sungai Dua Laut, Sungai Langawan, Sungai Kumpah, Sungai Betung. Panjang pantai ± 158,7 km dengan luas perairan 640,9 km².

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu adalah 216.008 jiwa yang terdiri dari 107.784 jiwa penduduk laki – laki dan 107.224 jiwa penduduk perempuan dengan rata – rata kepadatan penduduk adalah 41 jiwa/km². Etnis yang mendiami wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari Bugis, Banjar, Jawa, Babi, Batak, Lombok, Madura, Sunda, Ambon, Manado, Cina, Korea, Arab, Filipina dan India. Bahasa komunikasi adalah Bugis, Banjar dan Jawa.

Secara umum, masyarakat Tanah Bumbu dikenal sebagai masyarakat yang agamis, dengan kerukunan dan toleransi beragama yang cukup tinggi. Agama yang dianut masyarakat Tanah Bumbu antara lain : Islam, Kristen, Hindu dan Budha.

Prasarana perhubungan yang dimiliki berupa jalan darat sepanjang 1.375.030 km yang terdiri dari 157.600 km jalan negara, 96.000 km jalan provinsi dan 1.121.430 km jalan kabupaten. Disamping prasarana angkutan jalan darat ketersediaan prasarana laut dan sungai juga memegang peranan penting. Hal ini ditandai dengan keberadaan Pelabuhan Samudra di Batulicin, Pelabuhan Lokal di Pagatan, dan Pelabuhan di Satui yang merupakan pintu gerbang masuk ke Kabupaten Tanah Bumbu melalui laut. Untuk mendukung aktifitas perekonomian yang semakin tinggi, maka saat ini Kabupaten

Tanah Bumbu telah melengkapi diri dengan prasarana angkutan udara yang cukup memadai dan akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Kabupaten Tanah Bumbu diusia yang masih muda ini, dihadapkan pada beberapa permasalahan lingkungan seperti penurunan kualitas lingkungan sebagai warisan masa lalu. Hal ini berimbas pada penataan lingkungan yang kompleks, biaya yang tinggi dan memakan waktu pemulihan yang lama.

Pengintegrasian pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu, secara eksplisit tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Bumbu dengan mengembangkan strategi pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan berwawasan lingkungan hidup melalui penekanan pada pengelolaan lingkungan alam, pengelolaan lingkungan buatan dan pengelolaan lingkungan sosial.

Dililhami oleh manajemen Ilahiah bahwa tiga aspek penekanan ini dilakukan secara seimbang, tidak hanya menekankan pengendalian pencemaran tapi juga pengendalian upaya pengelolaan untuk melestarikan nikmat-Nya. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditujukan bagi peningkatan mutu hidup masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu

Kebersamaan dan kesepahaman para pihak dalam penanganan masalah lingkungan hidup dengan prinsip sinergi, sinkronisasi dan terpadu, sangat diperlukan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Penanggulangan masalah lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu yang meliputi : penurunan kualitas lingkungan dan faktor manajemen pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup yang belum memadai, dilakukan melalui strategi penanggulangan yang diarahkan pada pengendalian laju pengrusakan dan pencemaran, pembalikan arah kecenderungan menuju perbaikan kualitas lingkungan, pengembangan kualitas lingkungan yang sudah pulih, sosialisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pendidikan serta penataan hukum lingkungan (*Low Inforcement*).

1.3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam pemanfaatan SDA maka pembangunan diarahkan pada perbaikan pengelolaan SDA dan pelestarian mutu lingkungan hidup, mengelola SDA secara efisien, adil dan berkelanjutan serta mencegah terjadinya kerusakan SDA dan lingkungan hidup.

A. Arah Kebijakan

Hubungan yang erat antara pemanfaatan sumber daya alam dan permasalahan lingkungan daerah melandasi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu mensyaratkan beberapa upaya untuk menyelaraskan antara pemanfaatan SDA dan kelestariannya, berupa:

- Identifikasi potensi SDA dan lingkungan hidup wilayah untuk membangun kompetisi daerah yang didukung pengelolaan dan penataan ruang yang efektif dan rasional
- Pemeliharaan dan pemanfaatan SDA yang dapat diperbaharui (hutan, lahan dan perairan) melalui pembangunan kehutanan, pertanian dan kelautan secara berkelanjutan sebagai sistem pendukung kehidupan
- Pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbaharui secara strategis, ekstraksi secara efektif, perlindungan dan perbaikan kualitas lingkungan dan penyiapan kegiatan ekonomi alternatif pasca pemanfaatan
- Melaksanakan reklamasi di wilayah pertambangan
- Melakukan peremajaan kembali serta membuka tanah pertanian di lahan semak belukar guna memperluas area perkebunan
- Mencari alternatif terobosan tanaman kehutanan, perkebunan dan pertanian yang unggul
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara SDA di lingkungannya masing – masing
- Melakukan pendataan kembali tentang SDA dan wilayah yang telah dieksploitasi

Untuk menunjang kebijakan umum pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut di atas Kabupaten Tanah

Bumbu menetapkan 4 (empat) program pokok pengelolaan lingkungan hidup daerah pada tahun anggaran 2006-2007, yaitu :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Tujuan :

Untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah

Kegiatan :

- a. Penyuluhan dalam rangka peningkatan peranserta dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- b. Pembinaan dan pelatihan kader lingkungan hidup daerah
- c. Peningkatan kemampuan SDA/aparatur pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup
- d. Pengembangan sarana dan manajemen pemantauan kualitas lingkungan

2. Program Penyelamatan Sumberdaya Hutan, Tanah dan Air

Tujuan :

Untuk melindungi, mengendalikan dan memulihkan kembali fungsi ekologis sumberdaya hutan, tanah dan air sebagai suatu kesatuan ekosistem pendukung kehidupan

Kegiatan :

- a. Peningkatan pengelolaan kawasan hutan lindung dan daerah penyangganya
- b. Pengamanan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan habitatnya
- c. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
- d. Pengembangan sistem tata air berkelanjutan
- e. Pengembangan ruang terbuka hijau kota dan kawasan konservasi lainnya
- f. Penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis melalui pengembangan dan pemasyarakatan sistem konservasi lahan/pertanian dan rehabilitasi lahan-lahan kritis
- g. Peningkatan peranserta masyarakat dalam penghijauan dan rehabilitasi lahan dan hutan

3. Program Inventarisasi Sumberdaya Alam & Lingk. Hidup Hidup

Tujuan :

Untuk pengembangan sistem data dan informasi lingkungan

Kegiatan :

- a. Pengembangan perangkat/sistem data dan informasi lingkungan
- b. Inventarisasi dan pendataan SDA daerah
- c. Penyusunan data dasar lingkungan hidup daerah
- d. Penyusunan necara kualitas/Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

4. Program Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan

Tujuan :

Untuk mengantisipasi dan mengendalikan berbagai dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup daerah

Kegiatan :

- a. Pengendalian pencemaran air, tanah dan udara melalui pembinaan dan pengawasan kualitas limbah industri, pertambangan, pertanian, dan lain-lain
- b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL melalui inventarisasi usaha/kegiatan wajib AMDAL dan UKL-UPL, monitoring dan pengawasan pelaksanaan RKL/RPL serta pembinaan lingkungan industri kecil
- c. Pembinaan dengan penyusunan studi lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) proyek/kegiatan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
- d. Pembinaan kewajiban lingkungan dalam perijinan daerah

B. Sasaran

- a. Efisiensi pemanfaatan SDA yang tidak dapat diperbaharui secara efektif dan efisien
- b. Berkurangnya lahan kritis melalui upaya konservasi hutan dan rehabilitasi lahan
- c. Menurunnya tingkat pencemaran air dan udara

- d. Meningkatnya kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat/LSM
- e. Tersedianya data dan informasi yang akurat tentang SDA dan lingkungan hidup
- f. Pemanfaatan SDA yang dapat diperbaharui secara berlanjut dan terencana.

1.3.3. KEBIJAKAN TATA RUANG

A. Arah Kebijakan

- Mewujudkan Tata Ruang yang rinci dan memadai
- Sosialisasi tentang Fungsi Tata Ruang
- Membangun instruktur wilayah strategi dan cepat tumbuh
- Membangun pusat pemerintahan di Gunung Tinggi.

B. Sasaran

- Tersedianya dokumen Tata Ruang yang rinci dan memadai
- Masyarakat mengetahui dan memahami fungsi tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah
- Terbangunnya infrastruktur jalan untuk wilayah – wilayah strategi dan cepat tumbuh
- Terbangunnya pusat pemerintahan di Gunung Tinggi.

1.3.4. KEBIJAKAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA

A. Sosial

Peningkatan kesejahteraan sosial adalah upaya meningkatkan kesejahteraan warga dengan melalui pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat maka program pembangunan mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan serta kesempatan pemerataan dalam memperoleh pendidikan dan kesehatan.

1. Arah Kebijakan

Penanggulangan kemiskinan, guna menghormati dan melindungi dan memenuhi hak-hak dasar orang miskin, mulai hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, sampai pada hak partisipasi dalam perumusan kebijakan publik sebagai berikut :

- Mengkategorikan pola asuh ke dalam berbagai program kesejahteraan keluarga pada sektor – sektor terkait dan pelatihan keluarga harmonis dan bahagia
- Memberikan santunan dan kesempatan pendidikan dasar kepada anak yatim piatu sehingga dapat mempersiapkan diri sebagaimana anak – anak pada umumnya
- Memberikan santunan kepada orang tua lanjut usia yang sosial ekonominya tidak mampu
- Pembangunan pedesaan dengan mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi pedesaan
- Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat
- Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial
- Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan keluarga yang kecil dan berkualitas.

2. Sasaran Kebijakan

- Berkurangnya jumlah penduduk miskin baik di kota maupun di desa
- Semakin berkurangnya kesenjangan pembangunan kota dan desa
- Meningkatkan kualitas manusia secara menyeluruh sebagaimana dituntut dalam peningkatan SDM
- Membaiknya lingkungan hidup dan infrastruktur.

B. Ekonomi

Pembangunan potensi ekonomi masyarakat perlu ditumbuhkembangkan dengan memberikan kesempatan seluas – luasnya baik yang berbentuk badan hukum, kelompok masyarakat atau perorangan untuk berusaha ataupun membuka lapangan usaha baru. Sehingga memberikan peluang kesempatan kerja

bagi warga yang tidak dapat membuka usaha sendiri. Semua ini dapat memberikan penguatan pada usaha ekonomi makro, meso dan mikro pembangunan pemberdayaan ekonomi.

1. Arah kebijakan

- Meningkatkan pertumbuhan industri dan perdagangan
- Mewujudkan iklim investasi yang sehat
- Meningkatkan ekspor non migas
- Meningkatkan daya saing produksi industri.

2. Sasaran Kebijakan

- Meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan
- Terwujudnya iklim investasi yang sehat
- Meningkatnya ekspor non migas
- Meningkatnya daya saing produksi industri.

C. Budaya

1. Arah Kebijakan

- Menumbuhkan nilai – nilai budaya nasional dan daerah yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan
- Menumbuhkan dan melestarikan peninggalan sejarah, tradisi daerah yang positif serta menumbuhkembangkan kesenian daerah
- Mengembangkan pariwisata sebagai industri yang dapat menunjang bagi pertumbuhan kesenian dan budaya daerah
- Meningkatkan promosi dan daya tarik wisata.

2. Sasaran Kebijakan

- Berkembangnya nilai – nilai kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional di daerah yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan
- Terwujudnya pelestarian peninggalan sejarah, tradisi daerah yang positif serta menumbuh kembangkan kesenian daerah.

- Berkembangnya pariwisata sebagai industri yang dapat menunjang bagi pertumbuhan kesenian dan budaya daerah
- Peningkatan promosi wisata dan daya tarik wisata dan investor di bidang budaya dan pariwisata.

BAB II

ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

Kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu semakin tahun terus bertambah dan sangat memprihatinkan, berbagai macam cara telah dilakukan guna menekan kerusakan lingkungan hidup, tetapi belum mampu menghambat atau mengurangi laju dan kerusakan lingkungan tersebut. Di sisi lain, pembangunan baik pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang peningkatan ekonomi, pembukaan sentra-sentra industri dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang akhir - akhir terus dikembangkan yang secara tidak langsung akan membawa dampak terhadap kelangsungan lingkungan hidup.

Pada tahun 2007, tercatat beberapa isu lingkungan hidup utama di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :

- a. Penurunan kualitas dan kuantitas air, sebagai akibat dari meningkatnya pengerukan pasir sungai, sarana pelabuhan khusus dan kegiatannya, hilangnya/ pendangkalan alur alami sungai, penyempitan daerah tangkapan air, pengelolaan lingkungan yang tidak terencana dengan baik yang dilakukan oleh tambang batubara, besi, emas dan tambang lainnya, yang merupakan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendahi.
- b. Penurunan kualitas udara, karena meningkatnya kadar bahan pencemar udara akibat transportasi dan kegiatan prosesing tambang, industri CPO dan sebagian pelaku usaha atau masyarakat yang membakar lahannya untuk kepentingan sendiri karena beranggapan dengan membakar lahan tersebut memerlukan biaya yang murah, cepat dan efektif sehingga akumulasi dan kegiatan tersebut mengakibatkan kabut asap yang sangat merugikan, baik segi kesehatan maupun lingkungan.
- c. Kerusakan lingkungan fisik, sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam (kegiatan lading berpindah, perambahan hutan, pertambangan) yang tidak terkendali, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem yang lebih makro, dimana banyak hutan dan lahan mengalami kekeringan dan dalam kondisi kritis karena vegetasi pembentuk kawasan tersebut ditebang yang dapat menyebabkan terjadinya banjir, erosi dan sedimentasi.

- d. Kerusakan Pesisir, Laut dan Hutan Mangrove, akibat tidak disiplinnya jalur pelayaran tongkang batu bara, abrasi, pertambangan, pemukiman, pembangunan sarana dan prasarana, dan pengambilan kayu.
- e. Penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan karena hilangnya hutan kota dan jalur hijau oleh pemukiman dan pembangunan serta penanganan sampah yang belum maksimal.

BAB III

AIR

3.1. Kondisi Sumber Daya Air

Secara umum pola sungai di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu adalah berpola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan secara merata di seluruh daerah aliran sungai, maka puncak banjirnya akan sedemikian tinggi hingga berpotensi besar untuk menggenangi daerah yang ada di sekitar aliran sungai, baik pada bagian hulu maupun pada bagian hilir sungai dari DAS Tanah Bumbu (DAS Satui, DAS Kusan dan DAS Batulicin). Panjang DAS Satui ± 26 Km dan Lebar 25 m, DAS Kusan ± 81 Km dan Lebar 30 m, dan panjang DAS Batulicin ± 50 Km dan Lebar 26 m. Daerah Aliran Sungai tersebut memiliki banyak anak sungai yang digunakan sebagai sumber air dan transportasi sungai. Air sungai tersebut telah dimanfaatkan oleh penduduk untuk mandi, cuci, kakus air minum serta irigasi persawahan.

Kecenderungan konsumsi air bersih di Kabupaten Tanah Bumbu secara ekspansial akan terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan ketersediaan air bersih cenderung mengalami penurunan sebagai akibat adanya aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali, sehingga berakibat pada kerusakan alam dan pencemaran. Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi Kabupaten Tanah Bumbu yang berpenduduk ± 216.008 jiwa, menjadi hal yang sangat mendesak sesuai dengan tingkat kepadatan dan kemajuan Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan di sisi lain banyak perusahaan baik perkebunan, pertambangan maupun industri lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung limbah industri yang dihasilkan akan masuk / mengalir ke sungai dimana banyak penduduk Kabupaten Tanah Bumbu yang hidup disepanjang Daerah Aliran Sungai tersebut.

1. Kondisi Kuantitas Air

Potensi air di Kabupaten Tanah Bumbu cukup besar, salah satu diantaranya adalah potensi sumber daya air permukaan. Kondisi sumber daya air permukaan mulai menunjukkan gejala penurunan terhadap kuantitas air.

Kondisi ini dinilai dari besarnya fluktuasi debit air minimum dan maksimum pada DAS Tanah Bumbu yang selalu terjadi pada setiap musim kemarau, dimana air sungai mengalami kekeringan yang cukup signifikan artinya air surut lebih tinggi yang menyebabkan menurunnya debit air. Tetapi apabila terjadi curah hujan yang cukup banyak, maka DAS Satui, Kusan dan DAS Batulicin mengalami kenaikan debit air yang cukup tinggi tetapi keadaan airnya lebih keruh akibat tanah pada bagian hulu sungai ikut terikis.

2. Kondisi Kualitas Air

Selain kuantitasnya, kualitas air sungai yang ada di DAS Tanah Bumbu serta anak sungai juga mulai terjadi penurunan secara kualitas bila dibandingkan dengan sebelum adanya aktivitas-aktivitas yang menimbulkan dampak pencemaran.

Pada tahun 2007, telah dilakukan pemantauan kualitas air pada DAS Tanah Bumbu (DAS Satui, DAS Kusan dan DAS Batulicin) dengan mengambil 9 (sembilan) titik sampel secara random, dimana masing DAS diambil 3 (tiga) titik sampel. Sampel air tersebut dilakukan Uji Kualitas Air oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu yang bekerja sama dengan Laboratorium Fakultas Perikanan Unlam Banjarbaru, dengan hasil sebagai berikut :

a. Analisa Kualitas Air pada DAS Kusan

Tabel. 3.1. Data Sampel air pada daerah aliran sungai Kusan

Kegiatan	Titik Pengambilan Sampel		
	Titik I	Titik II	Titik III
Lokasi Pengambilan Sampel	Dermaga Kepayang Desa Tapus Kec. Kusan Hulu	Jembatan Binawara Desa Binawara Kec. Kusan Hulu	Jemb. Pagatan Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir
Titik Koordinat Pengambilan Sampel	0355109 - 9621053	0364268 - 9614682	0381215 - 9601596
Waktu Pengambilan Sampel	Periode I pada Bulan Mei Tahun 2007 Periode II pada Bulan November Tahun 2007		

Tabel. 3.2. Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Kusan

No	Parameter		HASIL ANALISA DAS KUSAN						BMA Per. Gub. Kal. Sel No. 05/2007
			Hulu		Tengah		Hilir		
			Periode		Periode		Periode		
			I	II	I	II	I	II	
1	Debit	m ³ /s	96	-	96	-	490	-	-
2	pH		7.52	7.3	7.66	7.3	7.49	6.96	6-9
3	Suhu	oC	33.7	30.1	33.5	30.2	31.5	30.2	Deviasi 3
4	DO	mg/l	4.04	2.78	4.68	2.82	1.85	2.43	Minimal 6
5	DHL	mS/m	146.5	162	150.8	185	138.1	350	-
6	TDS	mg/l	72.6	81.4	75.3	93.1	69	167	1000
7	Turbiditas	NTU	127	185	218	159	58	269	-
8	Salinitas	%	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.6	-
9	TSS	mg/l	132	57	162	43	97	60	50
10	BOD	mg/l	12.613	5.41	12.613	4.5	9.91	14.41	2
11	COD	mg/l	18.472	21.15	24.629	21.15	21.208	19.53	10
12	Hg	µg/l	2.135	1.5732	0.529	2.5267	0.915	1.8649	1
13	Mn	mg/l	0.031	0.04	0.047	0.04	0.013	0.1	0.1
14	Cd	mg/l	0.003	<0.001	0.003	<0.001	0.005	<0.001	0.1
15	Pb	mg/l	0.046	<0.001	0.054	<0.001	<0.001	<0.001	0.3
16	Cu	mg/l	0.012	0.014	0.022	0.003	<0.001	<0.001	0.02
17	Fe	mg/l	6.44	3.069	7.78	2.187	3.019	3.345	0.3
18	Minyak / Lemak	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1

b. Analisa Kualitas Air pada DAS Satui

Tabel. 3.3. Data Sampel air pada daerah aliran sungai Satui

Kegiatan	Titik Pengambilan Sampel		
	Titik I	Titik II	Titik III
Lokasi Pengambilan Sampel	Simpang Tiga Sei. Satui – Sei. Batulaki Desa Jombang Kecamatan Satui	Jembatan Sei. Danau Desa Satui Timur Kecamatan Satui	Sekitar Pelsus Satui Desa Satui Barat Kecamatan Satui
Titik Koordinat Pengambilan Sampel	0324514 - 9586172	0322999 - 9582208	0325704 - 9583425
Waktu Pengambilan Sampel	Periode I pada Bulan Mei Tahun 2007 Periode II pada Bulan November Tahun 2007		

Tabel. 3.4. Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Satu

No	Parameter		HASIL ANALISA DAS SATUI						BMA Per. Gub. Kal. Sel No. 05/2007
			Hulu		Tengah		Hilir		
			Periode		Periode		Periode		
			I	II	I	II	I	II	
1	Debit	m ³ /s	180	-	180	-	90	-	-
2	pH		6.84	6.93	6.73	6.84	6.84	6.82	6 - 9
3	Suhu	oC	27.9	31.2	28.5	30.4	28.1	32	Deviasi 3
4	DO	mg/l	2.45	2.4	5.67	2.31	2.45	2.18	Minimal 6
5	DHL	mS/m	115.4	198.6	99.5	202.1	99.6	207	-
6	TDS	mg/l	57.8	99	50	100.9	49.8	103.4	1000
7	Turbiditas	NTU	41.09	62	51	55	50	72	-
8	Salinitas	%	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	-
9	TSS	mg/l	59	91	6	145	16	70	50
10	BOD	mg/l	9.91	8.11	7207	9.91	5405	6.31	2
11	COD	mg/l	12.314	24.51	12.999	27.52	25.313	28.81	10
12	Hg	µg/l	1.423	<0.1	2.182	<0.1	1.367	<0.1	1
13	Mn	mg/l	<0.001	0.042	<0.001	0.013	<0.001	0.021	0.1
14	Cd	mg/l	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.1
15	Pb	mg/l	0.124	<0.001	0.067	0.291	0.06	0.095	0.3
16	Cu	mg/l	0.014	<0.001	0.014	0.099	<0.001	<0.001	0.02
17	Fe	mg/l	0.385	0.715	0.385	0.406	0.361	0.475	0.3
18	Minyak / Lemak	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1

c. Analisa Kualitas Air pada DAS Batulicin

Tabel. 3.5. Data Sampel air pada daerah aliran sungai Batulicin

Kegiatan	Titik Pengambilan Sampel		
	Titik I	Titik II	Titik III
Lokasi Pengambilan Sampel	Sungai Sela Mentewe Desa Suka Damai Kec. Mentewe	Jembatan Karang Bintang Ds. Karang Bintang Kec. Karang Bintang	Jembatan Batulicin Desa Batulicin Kec. Batulicin
Titik Koordinat Pengambilan Sampel	0362766 - 9637031	0379571 - 9624583	0386154 - 9618995
Waktu Pengambilan Sampel	Periode I pada Bulan Mei Tahun 2007		Periode II pada Bulan November Tahun 2007

Tabel. 3.6. Hasil Analisa Kualitas Air pada Daerah Aliran Sungai Batulicin

No	Parameter		HASIL ANALISADAS BATULICIN						BMA Per. Gub. Kal- Sel No. 05/2007
			DAS BATULICIN						
			Hulu		Tengah		Hilir		
			I	II	I	II	I	II	
1	Debit	m ³ /s	144	-	105	-	165	-	-
2	pH		7.4	7.37	7.16	7.11	6.77	7.66	6-9
3	Suhu	oC	26.4	32.5	27.3	29.2	27.7	31.4	Deviasi 3
4	DO	mg/l	3.18	5.45	2.84	2.91	2.61	8.91	Minimal 6
5	DHL	mS/m	185.4	242.3	124.5	210	5.06	49.1	-
6	TDS	mg/l	89.5	120.9	62.6	103.5	2.55	24.4	1000
7	Turbiditas	NTU	233	367	295	443	103	5.41	-
8	Salinitas	%	0.3	0.6	0.4	0.4	9.7	93.6	-
9	TSS	mg/l	128	82	198	89	185	98	50
10	BOD	mg/l	13.514	3.6	10.811	4.5	9.009	2.7	2
11	COD	mg/l	18.317	15.56	21.299	15.86	46.857	36.92	10
12	Hg	µg/l	2.735	3.425	0.529	4.247	0.549	3.537	1
13	Mn	mg/l	0.001	0.106	0.001	0.154	0.001	<0.001	0.1
14	Cd	mg/l	0.008	<0.001	0.09	<0.001	0.014	0.046	0.1
15	Pb	mg/l	0.073	0.007	0.057	0.041	0.216	0.261	0.3
16	Cu	mg/l	0.008	<0.001	0.529	<0.001	0.549	0.014	0.02
17	Fe	mg/l	5.75	5.809	7.370	6.493	3.335	0.357	0.3
18	Minyak/ Lemak	mg/l	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1

Secara umum dapat dilihat kondisi kualitas air pada 3 (tiga) DAS di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :

1. Dari hasil analisa kualitas air di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang meliputi Sungai Kusan, Sungai Satui dan Sungai Batulicin banyak sekali parameter – parameter penting seperti konsentrasi oksigen terlarut (DO) dan logam-logam berat seperti Merkuri (Hg), sudah sangat mengawatirkan, mengingat konsentrasi parameter tersebut sudah jauh sekali dari Baku Mutu Air yang diperbolehkan.
2. Perubahan konsentrasi parameter – parameter kualitas air Sungai Kusan, Sungai Satui dan Sungai Batulicin dari kedua periode pemantauan mengalami perubahan konsentrasi, sebagian menurun dan ada yang sebagian yang meningkat konsentrasinya, namun terkhusus untuk parameter logam secara rata – rata mengalami peringkatan dari setiap titik pemantauan untuk semua Sungai di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Konsentrasi parameter – parameter kualitas air yang melebihi Baku Mutu Kualitas Air (tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan), meliputi : DO (Oksigen Terlarut), TSS, BOD (Biological Oxygent Demand), COD (Chemical Oxygent Demand) dan Logam – logam seperti Hg (Merkuri), Mn (Mangan), Cu (Tembaga), dan Fe (Besi), baik pada Sungai Kusan, Sungai Satui maupun pada Sungai Batulicin.
4. Peruntukan Sungai Kusan, Sungai Satui dan Sungai Batulicin sebagai Air Baku untuk pengolahan air minum sudah tidak layak lagi, mengingat konsentrasi Logam – logam berat seperti Hg (Merkuri), Mn (Mangan), Cu (Tembaga), dan Fe (Besi) sudah mencemari perairan tersebut.

Disamping kegiatan Analisa Kualitas Air yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tersebut diatas, Analisis Kualitas Air juga dilakukan oleh Perusahaan Tambang Batubara milik PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.7. Data Analisa Kualitas Air pada bagian Hulu Sungai Ata Km 62 PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin

Parameter	Satuan	BMA Per. Gub. Kal-Sel No. 05/2007	Hasil Pengukuran			
			Triwulan I/06	Triwulan II/06	Triwulan III/06	Triwulan IV/06
Suhu	°C	Deviasi 3	23.5	25.7	26.1	27.4
TDS	mg/l	1000	40.5	39.4	36.5	39.4
TSS	mg/l	50	3	15	64	115.4
Turbidity	NTU	-	10	40	31	268
DHL	mS/m	-	0.185	0.164	0.225	0.164
Salinitas	%	-	0	0	0	0
pH	-	6-9	7.5	6.7	7.787	6.3
SO ₄	mg/l	-	0	8	7	21
H ₂ S	mg/l	-	0.002	0.009	0.001	0.018
DO	mg/l	Minimal 6	6.37	5.5	6.05	3.86
BOD ₅	mg/l	2	15.2	14.2	6.89	8.725
COD	mg/l	10	23.4	26.5	17.23	13.455
Fe	mg/l	0.3	0.14	-	0.02	0.08
Mn	mg/l	0.1	0	0	0	< 0.1
Pb	mg/l	0.3	0.064	0.002	0.0022	< 0.002
Hg	mg/l	1	0.1	0.1		< 0.1
Cu	mg/l	0.02	0.01	0	0.06	0.26
Minyak	mg/l	1	0.01	0.01	0.01	< 0.01

Tabel 3.8. Data Analisa Kualitas Air pada Hilir Sungai Ata Km 50 PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin

Parameter	Satuan	SK.Gub.Kalsel No. 28 Tahun 1994	Hasil Pengukuran			
			Triwulan I/06	Triwulan II/06	Triwulan III/06	Triwulan IV/06
Suhu	°C	27	23	25.3	26.2	28
TDS	mg/l	1000	160.5	87.6	37.4	87.6
TSS	mg/l	-	25	28	108	112.2
Turbidity	NTU	-	21	303	34	238
DHL	mS/m	-	0.198	0.128	0.22	0.206
Salinitas	%	-	0.1	0	0	0
pH	-	9	7.4	6.34	7.68	7.34
SO ₄	mg/l	400	45	4	61	68
H ₂ S	mg/l	0.1	0.004	0.011	0.007	0.019
DO	mg/l	6	6.37	5.57	4.25	3.47
BOD ₅	mg/l	-	14.3	13.9	6.89	8.405
COD	mg/l	-	21.2	22.7	17.23	13.34
Fe	mg/l	5	0.41	-	0.36	0.06
Mn	mg/l	0.3	0.3	0.1	0	< 0.1
Pb	mg/l	0.1	0.002	0.042	0.0024	0.0124
Hg	mg/l	0.001	0.1	0.1	0.1	< 0.1
Cu	mg/l	1	0.05	0	0.03	0.24
Minyak	mg/l	-	0.01	0.01	0.01	< 0.01

Tabel 3.9. Data Analisa Kualitas Air pada Hulu Sungai Sela PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin

Parameter	Satuan	SK.Gub.Kalsel No. 28 Tahun 1994	Hasil Pengukuran			
			Triwulan I/06	Triwulan II/06	Triwulan III/06	Triwulan IV/06
Suhu	°C	27	26.5	27.6	25.9	27.3
TDS	mg/l	1000	127	89.7	39.1	89.7
TSS	mg/l	-	429	115	110	115.4
Turbidity	NTU	-	47	153	61	323
DHL	mS/m	-	0.194	0.15	0.39	0.138
Salinitas	%	-	0	0	0	0
pH	-	9	6.95	6.91	6.92	6.31
SO ₄	mg/l	400	16	17	6	329
H ₂ S	mg/l	0.1	0.023	0.023	0.005	0.01
DO	mg/l	6	5.41	5.92	4.2	3.49
BOD ₅	mg/l	-	16.7	14.2	6.89	9.01
COD	mg/l	-	25.3	24.7	17.23	13.68
Fe	mg/l	5	0.62	-	0.09	0.12
Mn	mg/l	0.3	0.5	0.4	0	0.5
Pb	mg/l	0.1	0.002	0.1	0.0026	0.0024
Hg	mg/l	0.001	0.1	0.1	0.1	< 0.1
Cu	mg/l	1	0.18	0.06	0.04	0.57
Minyak	mg/l	-	0.01	0.01	0.01	< 0.01

Tabel 3.10. Data Analisa Kualitas Air Hilir Sungai Sela PT.Arutmin Indonesia Tambang Batulicin

Parameter	Satuan	SK.Gub.Kalsel No. 28 Tahun 1994	Hasil Pengukuran			
			Triwulan I/06	Triwulan II/06	Triwulan III/06	Triwulan IV/06
Suhu	°C	27	26.4	25.7	25.8	27.1
TDS	mg/l	1000	117.5	101.6	40.2	101.6
TSS	mg/l	-	421	105	105	105.5
Turbidity	NTU	-	49	173	62	324
DHL	mS/m	-	0.145	0.157	0.412	0.355
Salinitas	%	-	0	0	0	0.01
pH	-	9	6.92	6.56	6.91	5.03
SO ₄	mg/l	400	53	115	200	359
H ₂ S	mg/l	0.1	0.017	0.005	0.002	0.019
DO	mg/l	6	5.42	5.78	4.12	3.01
BOD ₅	mg/l	-	16.5	13.6	6.89	8.22
COD	mg/l	-	24.8	23.6	17.23	12.98
Fe	mg/l	5	0.82	-	0.01	0.02
Mn	mg/l	0.3	0.2	1.6	0.8	0.2
Pb	mg/l	0.1	0.0364	0.089	0.0028	0.0891
Hg	mg/l	0.001	0.1	0.1	0.1	< 0.1
Cu	mg/l	1	0.07	0	0.01	0.48
Minyak	mg/l	-	0.01	0.01	0.01	< 0.01

Tabel 3.11 Data Analisa Kualitas Air di depan Pelabuhan CK PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin

Parameter	Satuan	Kep.Men.LH No. 51 Tahun 2004	Hasil Pengukuran			
			Triwulan I/06	Triwulan II/06	Triwulan III/06	Triwulan IV/06
Suhu	°C	Alami	28.7	27.9	25.2	20.9
TDS	mg/l	-	36600	-	40.6	32200
TSS	mg/l	80	65	45	115	45.5
Turbidity	NTU	30	26	28	45	82
DHL	mS/m	-	39.4	37.5	0.227	47.9
Salinitas	%	Alami	30.4	24.7	0	34.7
pH	-	6.5- 8.5	7.6	7.5	6.56	7.2
SO ₄	mg/l	-	1120	-	600	525
H ₂ S	mg/l	0.03	0.009	0.01	0.003	0.007
DO	mg/l	-	6.25	5.8	4.15	4.82
BOD ₅	mg/l	-	12.4	12.5	7.48	10.811
COD	mg/l	-	19.8	20.1	18.69	15.755
Fe	mg/l	-	0.32	0.1	0.14	0.01
Mn	mg/l	-	0.2	0.1	0	0.1
Pb	mg/l	0.05	0.0306	0.002	0.0024	< 0.002
Hg	mg/l	0.003	0.1	0.1	0.1	< 0.1
Cu	mg/l	0.05	0.08	0.79	0.08	0.31
Minyak	mg/l	5	0.01	0.01	0.01	< 0.01

Tabel 3.12 Data Analisa Kualitas Air di depan Pelabuhan Kodeco PT. Arutm in Indonesia Tambang Batulicin

Parameter	Satuan	Kep.Men.LH No. 51 Tahun 2004	Hasil Pengukuran			
			Triwulan I/06	Triwulan II/06	Triwulan III/06	Triwulan IV/06
Suhu	°C	Alami	28.2	28.2	25.7	30.7
TDS	mg/l	-	36600	-	32190	32190
TSS	mg/l	80	12	39	69	43.7
Turbidity	NTU	30	22	29	50	55
DHL	mS/m	-	38.5	40.3	50.3	53.9
Salinitas	%	Alami	30.7	26.2	30.2	34.9
pH	-	6.5- 8.5	7	6.7	7.56	7.18
SO ₄	mg/l	-	980	-	875	310
H ₂ S	mg/l	0.03	0.0006	0	0.008	0.02
DO	mg/l	-	7.73	5.9	6.95	3.98
BOD ₅	mg/l	-	12.7	12.9	9.49	9.514
COD	mg/l	-	21.6	22.3	21.3	14.295
Fe	mg/l	-	0.14	0	0.06	0.01
Mn	mg/l	-	0	0.3	0	0.3
Pb	mg/l	0.05	0.0242	0.002	0.0024	< 0.002
Hg	mg/l	0.003	0.1	0.1	0.1	< 0.1
Cu	mg/l	0.05	0.03	1.63	0.16	0.51
Minyak	mg/l	5	0.01	0.01	0.01	< 0.01

Dari beberapa tabel dan grafik tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari beberapa lokasi pemantauan kualitas air, ada beberapa parameter yang berada di bawah baku mutu maupun di luar baku mutu yang dipersyaratkan. Parameter yang berada di bawah baku mutu adalah parameter DO pada lokasi hulu Sungai Ata Km 62, hilir Sungai Ata Km 62, Hulu dan Hilir Sungai Sela. Rendahnya parameter DO disebabkan teroksidasinya senyawa pyrite akibat pembongkaran tanah pucuk mengakibatkan peningkatan kadar keasaman tanah sehingga menyebabkan penurunan DO.

Disamping itu maraknya aktifitas pertambangan/pembukaan lahan memungkinkan terlarutnya lapisan tanah atas (top soil) yang mengandung humus dalam muatan sedimen. Terlarutnya bahan organik dalam humus ke sungai mengakibatkan kenaikan kadar BOD dan penurunan DO. Sebab lain yang juga mengakibatkan penurunan DO adalah terjadinya peluapan pada saat musim hujan yang menyebabkan banyaknya sedimen-sedimen yang terlarut dalam air sungai. Sedangkan parameter yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan diantaranya adalah parameter Hg, Cu, Mn, TDS pada lokasi di depan Pelabuhan CK dan Pelabuhan Kodeco. Konsentrasi Hg, Cu dan Mn yang melebihi baku mutu yang dipersyaratkan merupakan fenomena umum

ditemukan pada lahan-lahan tambang batubara yang sedang beraktifitas dan belum direklamasi. Hal tersebut disebabkan oleh terkesposnya batuan penutup karena adanya aktifitas penggalian lahan dan batuan pada lubang tambang. Untuk kawasan perairan pelabuhan diakibatkan dari berkembangnya daerah sekitar pelabuhan muatan. Hal tersebut berdampak meningkatnya konsentrasi Hg, Cu dan Mn. Sedangkan peningkatan konsentrasi TDS bersumber dari kelarutan garam yang tinggi karena tercampur/kemasukan air laut.

Kecondongan penurunan kualitas terjadi karena sumberdaya air belum mendapat perlindungan, pelestarian dan peningkatan efisiensi yang memadai dan penggunaan kawasan daerah tangkapan air yang kurang bijaksana.

Secara kualitatif penurunan kualitas air dapat diindikasikan dengan sulitnya penduduk yang bermukim di sepanjang sungai untuk mendapatkan air bersih meskipun secara kuantitatif air tersedia dalam jumlah besar. Penurunan kualitas air di daerah tengah dan hilir diduga karena aktifitas pertambangan, perhubungan serta aktifitas domestik masyarakat.

Pemecahan masalah untuk hal tersebut di atas data dan informasi indikator lingkungan yang lengkap dan valid khususnya kualitas air sangat penting dilakukan sebagai salah satu acuan status lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pada sektor bangunan, pembangunan ruko dan pemukiman baru memberi dampak terhadap pengurangan daerah resapan air, sehingga ada kecenderungan bahaya banjir sehingga akan mengganggu kesehatan masyarakat.

Pada sub sektor peternakan sedikit banyaknya akan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan. Dampak positifnya seperti sebagai sumber pendapatan masyarakat, sedangkan dampak negatif limbahnya dapat merusak dan mencemari lingkungan karena kotoran ternak yang tidak diolah akan terbawa air hujan kemudian mengalir ke sungai yang dekat dengan lokasi peternakan, selain itu dengan bantuan air hujan kotoran akan meresap ke dalam ke dalam tanah dan masuk ke sumber air yang biasa digunakan untuk air minum. Dengan kondisi ini maka akan mengganggu kesehatan masyarakat.

3.2. Penyebab Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air

Kecenderungan debit air pada DAS lingkup Kabupaten Tanah Bumbu yang mengalami fluktuatif yang signifikan selain disebabkan pengaruh musim hujan dan musim kemarau, diantaranya juga disebabkan oleh adanya tekanan jumlah penduduk yang semakin besar, perluasan dan pengembangan areal industri, alih fungsi lahan dan kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) serta perambahan hutan tanpa ijin (*illegal logging*) yang tanpa mengindahkan fungsi lingkungan sebagai penyangga kehidupan (*Lift buffer*).

Kegiatan *illegal minning* di sepanjang DAS Tanah Bumbu cukup marak, dimana kegiatannya yaitu menambang pasir dan emas. Penambangan dilakukan di pinggir maupun di tengah sungai dengan menggunakan peralatan yang serba mekanis dengan volume yang yang besar. Akibat penambangan pasir mengakibatkan struktur tanah pembentuk dan penyangga tepi sungai mengalami erosi yang sangat tinggi sehingga bibir sungai banyak yang terkikis ke darat dan mengalami sedimentasi yang mengakibatkan debit air akan turun sehingga daya tampung sungai mengalami penurunan. Kegiatan penebangan liar atau dikenal *illegal logging* di Kabupaten Tanah Bumbu juga mempunyai andil yang cukup besar dalam memberi tekanan terhadap potensi sumber-sumber air baik di danau maupun di DAS Tanah Bumbu sendiri.

Akibat penebangan yang tidak mematuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan menyebabkan areal tangkapan air (*water catchment area*) mengalami penurunan secara drastis sebab penyangga utama sebagai penangkap atau penahan air adalah vegetasi atau pohon-pohon yang berada di kawasan hutan tersebut sudah dibabat habis. Kerusakan hutan dan lahan tersebut akan menyebabkan terjadinya sedimentasi pada sungai-sungai di DAS Tanah Bumbu yang pada akhirnya menyebabkan potensi air yang tertampung semakin sedikit dan akan menyebabkan banjir yang merata pada wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

Alih fungsi lahan dan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan menjadikan sumber potensi pencemaran terhadap air di DAS Tanah Bumbu semakin meningkat. Hal ini disebabkan, banyaknya pembukaan lahan untuk perkebunan sawit secara serentak dan besar-besaran berakibat hilangnya penyangga-penyangga dan penahan air yang baik, hal ini disebabkan akar-akar kelapa sawit tidak dapat menggantikan sebagai penangkap air yang baik. Ini akan berakibat pada penurunan potensi air dan menyebabkan tingkat sedimentasi dan erosi yang tinggi.

Kegiatan industri dan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi tidak menutup kemungkinan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, limbah yang dibuang atau dikelola pada instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) akan menyebabkan pencemaran di DAS Tanah Bumbu. Apabila ini terjadi maka perusakan lingkungan pada DAS Tanah Bumbu akan terancam dan perlu diselamatkan.

3.3. Dampak Terjadinya Penurunan Kuantitas dan Kualitas Air

Aktivitas pada sektor kehutanan berdampak pada menurunnya kualitas air sedangkan akibat dari kerusakan hutan bakau/mangrove yaitu intrusi air laut ke air tanah/air permukaan/air baku PDAM serta ke daerah pertanian.

Pada sektor pertambangan, bekas tambang ditinggalkan begitu saja tanpa ditutup lagi, kualitas air tergenang sudah asam sehingga pada saat ditambang oleh pemegang PKP2B sudah sangat sulit mengatur tata air yang sudah rusak dan juga sulit memperoleh top soil saat reklamasi.

Kegiatan pertambangan rakyat antara lain emas, pasir, batu dan lain-lain berdampak positif yang dinikmati langsung oleh masyarakat penambang, sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. Di sisi lain juga berdampak negatif terhadap lingkungan fisik kimia dan sosial, antara lain berdampak adanya lubang-lubang/cekungan yang tidak reklamasi sumber pencemar air terutama peningkatan kekeruhan, penurunan tingkat keasaman (pH), peningkatan kandungan air raksa pada pertambangan emas, pendangkalan sungai akibat pengendapan lumpur atau pasir, penyebab erosi dan sedimentasi yang pada akhirnya merusak DAS dan tata air.

Pemasalahan air terjadi karena sumber daya air belum mendapat perlindungan, pelestarian dan peningkatan efisiensi yang memadai dan penggunaan kawasan daerah tangkapan air yang tidak bertanggung jawab. Besarnya tekanan penggunaan lahan dan perubahan fungsi lahan akibat pertambahan penduduk dan berbagai kegiatan sektoral telah membuat daerah resapan air semakin sempit dan tidak cukup efektif. Kerusakan ekosistem DAS dan tata air, yang berarti berkurangnya areal hutan yang berfungsi menahan air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah menyebabkan air hujan langsung ke laut.

Pemasalahan *catchment area* (DTA) ini lebih disebabkan oleh kegiatan pertambangan, belum maksimalnya reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang serta perambahan hutan sehingga kecepatan bertambahnya luasan degradasi hutan dan lahan yang tidak sebanding dengan luasan lahan

yang direhabilitasi. Berdasarkan data sementara, bahwa luas DTA di Kabupaten Tanah Bumbu diperkirakan 1.694,132 Ha. Hal ini sudah seharusnya ditangani secara serius untuk dilakukan pengendalian, perbaikan dan pengembangan DTA.

Secara kualitatif, penurunan kualitas air dapat diindikasikan dengan sulitnya penduduk yang bermukim di sepanjang pinggir sungai untuk mendapatkan air bersih meskipun secara kuantitatif air tersedia dalam jumlah besar. Kasus menurunnya kualitas sumber daya air disamping terkait dengan buangan limbah yang tidak terencana dan terkendali dengan baik juga dipengaruhi oleh kerusakan DTA oleh kegiatan perambahan hutan. Sekarang yang cukup menonjol adalah akibat dari kegiatan pertambangan batubara.

Kegiatan pertambangan bahkan pertanian sekalipun, memberikan kontribusi yang sangat nyata terhadap penurunan kualitas air, terutama dari suplai material padatan hingga bahan organik ke sistem perairan.

Berdasarkan kondisi riil di lapangan, bahwa beberapa kecamatan/desa di Kabupaten Tanah Bumbu telah menjadi langganan kedatangan banjir pada setiap musim hujan, seperti Kecamatan Satui dan Kusan Hulu. Sebaliknya kondisi air tanah pada musim kemarau sangat rendah sehingga banyak penduduk yang mengalami kekurangan air, baik untuk keperluan domestik maupun pertanian terutama di daerah dataran tinggi seperti Kecamatan Sei. Loban dan Angsana. Di samping itu di beberapa desa khususnya di Kecamatan Kusan Hilir yang berada 0 – 3 meter dpl, hampir setiap tahunnya terjadi intrusi air laut pada sumur penduduk dan air baku PDAM.

Lokasi pengambilan sampel Air Badan Air (ABA) dilakukan pada sungai di wilayah Kecamatan Kusan Hulu, Kecamatan Batulicin dan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dengan pertimbangan, bahwa jumlah penduduk terbanyak sebagai pengguna air sungai untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sebagai air baku untuk PDAM. Sungai tersebut juga digunakan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas mereka, seperti : jalur transportasi, perekonomian, industri bahkan juga sebagai tempat pembuangan limbah domestik terutama bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai.

Dari hasil analisa tersebut diatas, banyak sekali parameter-parameter kualitas air yang konsentrasinya tidak sesuai dengan Baku Mutu Air yang dipersyaratkan. Dalam pembahasan ini dijelaskan masing-masing parameter kualitas air pada Sungai Kusan, Sungai Satui dan Sungai Batulicin, sejauh

mana perubahan parameter kualitas air tersebut terhadap Baku Mutu Air yang dipersyaratkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap Lingkungan dan kesehatan manusia.

3.4. Respon dan Kebijakan yang diambil

Melihat kondisi kualitas sumber daya air di Kabupaten Tanah Bumbu yang cenderung mengalami penurunan walaupun masih dalam batas normal, maka pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu merespon keadaan tersebut agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih berat. Adapun kebijakan yang dilakukan dalam menanggulangi hal-hal yang disebutkan diatas, dilakukan pemantauan kualitas air secara berkala dilaksanakan dalam 2 (dua) periode dalam setahun yaitu periode I pada musim hujan dan Periode II pada musim kemarau karena keterbatasan dana dan peralatan.

Kebijakan yang lainnya, diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL agar dalam pengelolaan industri harus mengelola limbah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, menindak tegas terhadap pelaku illegal logging, menerbitkan penambang-penambang tanpa ijin kemudian dilakukan pembinaan agar dalam melakukan kegiatannya selalu mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan.



Gambar 1. Kondisi Sumber Daya Air DAS Kusan dan Satui

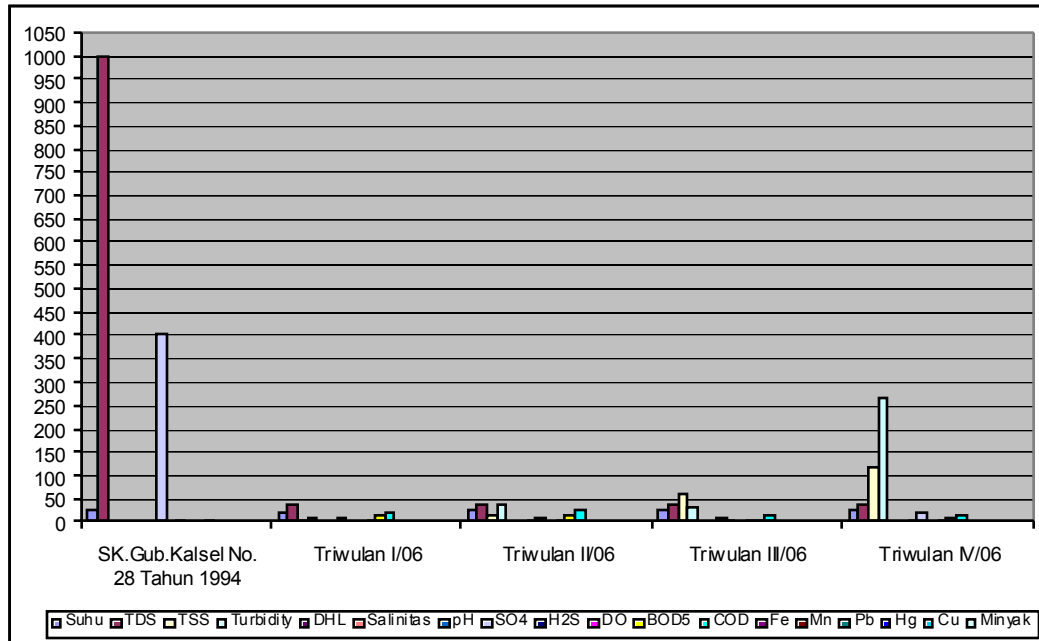


Gambar 2. Pengambilan Sampel Air I

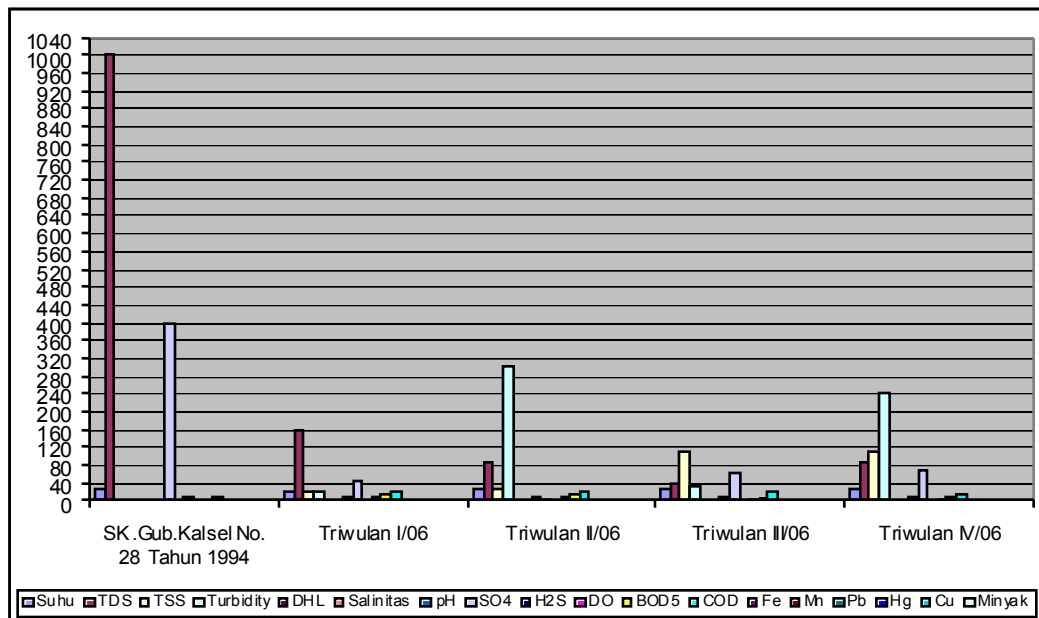


Gambar 3. Pengambilan Sampel Air II

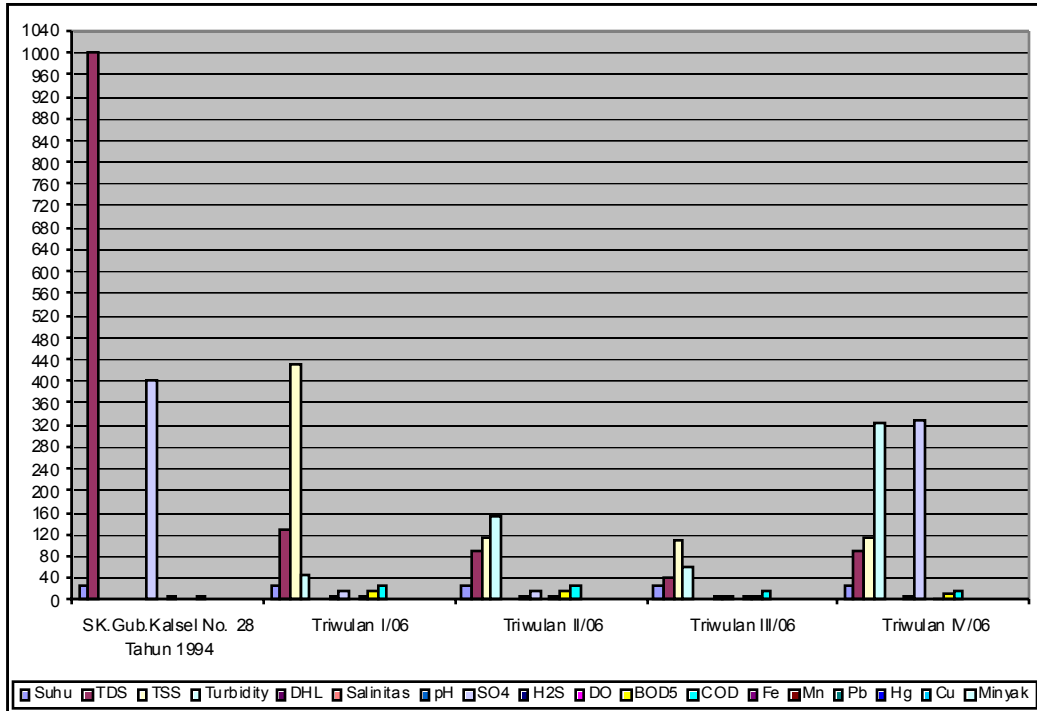
Grafik 3.1. Analisa Kualitas Air pada Hulu Sungai Ata Km 62 PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin



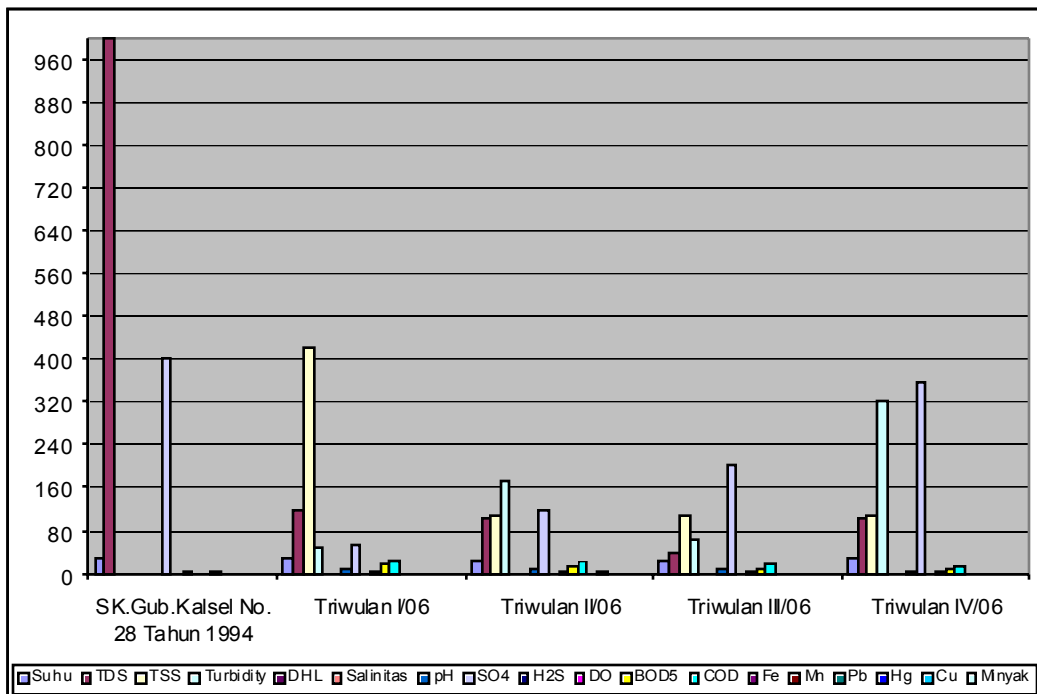
Grafik 3.2. Analisa Kualitas Air pada Hilir Sungai Ata Km 50 PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin



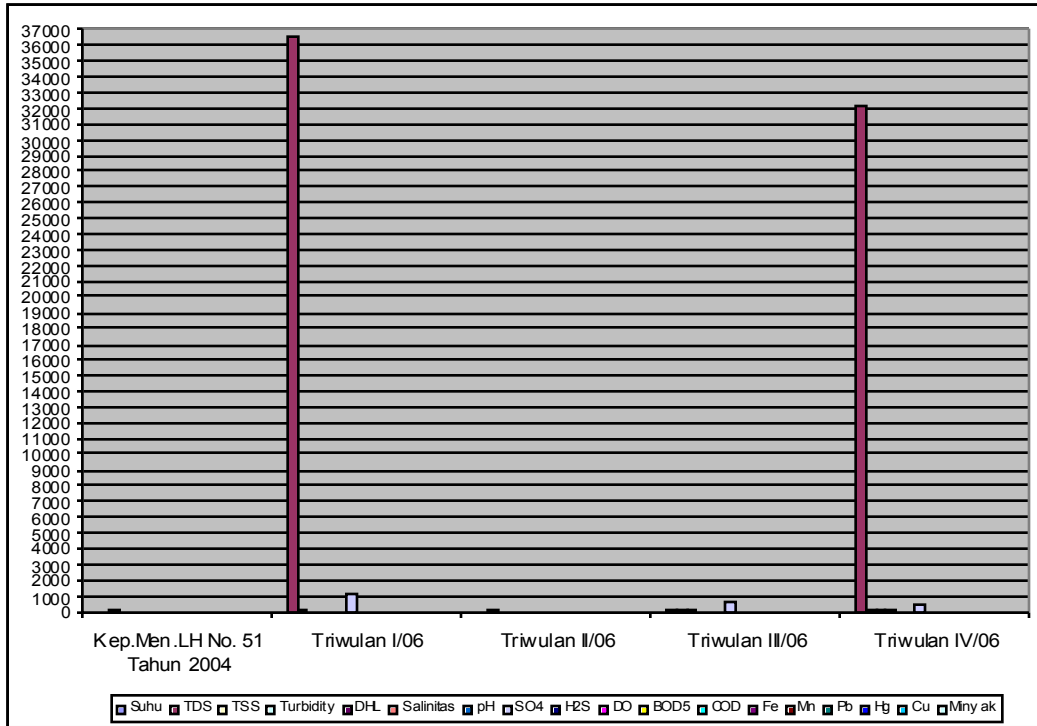
Grafik 3.3. Analisa Kualitas Air pada Hulu Sungai Sela PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin



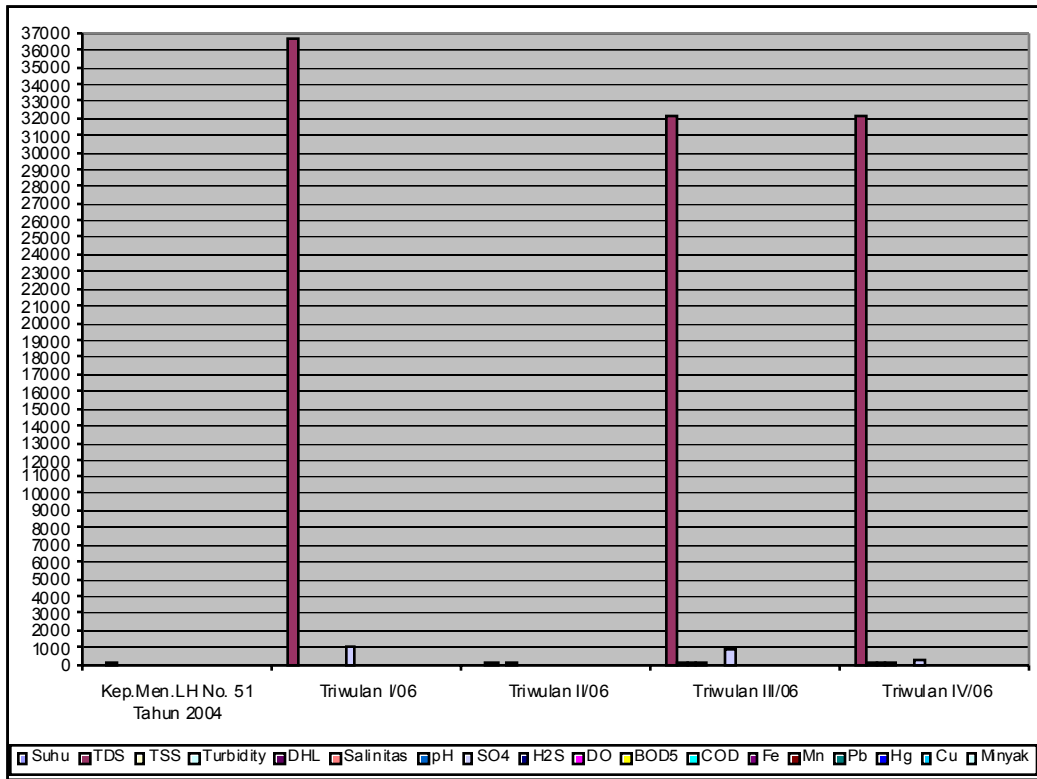
Grafik 3.4. Analisa Kualitas Air pada Hilir Sungai Sela PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin



Grafik 3.5 Analisa Kualitas Air di Depan Pelabuhan CK PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin



Grafik 3.6 Analisa Kualitas Air di Depan Pelabuhan Kodeco PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin



BAB IV UDARA

4.1. Kondisi Udara

Udara mempunyai arti penting di dalam kehidupan makhluk hidup dan keberadaan benda-benda lainnya. Sehingga udara merupakan sumberdaya alam yang harus diindungi untuk hidup dan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Hal ini berarti pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mendapatkan udara sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan maka pengendalian pencemaran udara menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai fungsinya.

Dalam pencemaran udara selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran udara yaitu sumber yang bergerak (umumnya kendaraan bermotor) dan sumber tidak bergerak (umumnya kegiatan industri) sedangkan pengendaliannya selalu terkait dengan serangkaian kegiatan pengendalian yang bermuara dan batasan baku mutu udara.

Status mutu udara ambien daerah merupakan mutu udara ambien yang menggambarkan keadaan kualitas udara ambien di suatu lokasi pada waktu tertentu. Kondisi udara Kabupaten Tanah Bumbu masih dalam ambang normal, kondisi terburuk hanya terjadi pada musim kemarau yaitu adanya peningkatan kadar debu sehingga mengganggu aktivitas masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu tetapi setelah masuk musim hujan kondisi peningkatan kadar debu tersebut sudah berkurang. Secara umum Kabupaten Tanah Bumbu pencemaran udara belum terjadi karena kualitas udara masih dibawah standar baku mutu udara sehingga belum dikatakan tercemar, tetapi tahun berikutnya mungkin ada perubahan yang cukup signifikan apabila sumber-sumber pencemaran udara seperti industri sudah beroperasi secara keseluruhan.

Dampak yang ditimbulkan oleh peningkatan kadar debu pada musim kemarau adalah berkurangnya jarak pandang karena terhalang oleh debu aktivitas lalu lintas khususnya dari truk-truk pengangkut muatan batubara/bijih besi maupun kelapa sawit, terjadinya iritasi pada mata dan terganggunya saluran pernapasan. Hal ini berakibat terganggunya aktivitas masyarakat, industri dan dunia usaha yang juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.

4.2. Penyebab Penurunan Kualitas Udara

Kegiatan pembangunan pada umumnya menyangkut tentang pendayagunaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Sumber daya alam dan lingkungan merupakan satu kesatuan dalam system ekologi atau ekosistem yang dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia. Dalam system ekologi atau ekosistem, manusia tidak saja sebagai konsumen tetapi sekaligus juga berperan aktif dalam proses produksi pengelolaan.

Pembangunan diberbagai sektor terlihat berkembang sangat pesat, dan dapat dimaklumi dengan munculnya berbagai sektor tersebut dapat memberikan dampak bagi kehidupan manusia maupun terhadap lingkungan.

Khusus kegiatan di sektor pertambangan dan energi di Kabupaten Tanah Bumbu sangat pesat perkembangannya, terutama kegiatan pertambangan batubara dan bijih besi dengan ditandai hadirnya perusahaan besar dan kecil yang masing-masing melakukan eksplorasi dan eksploitasi, bahkan sampai saat ini telah dirasakan nilai banyak pengaruh yang ditimbulkannya, baik pengaruh terhadap lingkungan maupun sosial.

Kegiatan tersebut disamping dapat menimbulkan dampak positif, berupa kenaikan devisa negara, pendapatan asli daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja dan menjadi transfer teknologi secara langsung, namun demikian ternyata juga memberikan dampak negatif terhadap kerusakan bentang alam dan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara.

4.3. Dampak Terjadinya Penurunan Kualitas Udara

Aktivitas pada sektor kehutanan berdampak pada menurunnya kualitas udara, karena penebangan liar serta pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan pertambangan sehingga berkurangnya oksigen hasil proses fotosintesis dari tumbuhan hutan.

Pada sektor pertambangan konsentrasi debu lebih banyak diakibatkan oleh transportasi dan processing bahan tambang (Batubara, Bijih Besi). Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kadar debu udara ambien.

Sebagian transportasi bahan tambang oleh beberapa perusahaan tambang dilakukan melalui jalan negara dan bukan jalan khusus. Debu akibat transportasi bahan tambang (batubara dan bijih besi) ini sangat dirasakan oleh penduduk yang bermukim di sepanjang jalur transportasi menuju pelabuhan pemuatan seperti Di Kecamatan Satui dan Kecamatan Batulicin terutama pada musim kemarau.

Pada processing batubara dan bijih besi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas udara sekitar seperti meningkatnya kandungan CO₂, SO_x dan NO_x, kadar debu dan partikulat lainnya serta meningkatnya kebisingan.

Akibat penambangan batubara dan belum maksimalnya reklamasi bekas tambang, mengakibatkan polusi udara yang dirasakan masyarakat di sepanjang jalur transportasi dan stock pile.

Efek penurunan kualitas udara ini berpengaruh terhadap gangguan pemapasan manusia, karena partikel ini akan menyebabkan terjadinya penimbunan di paru-paru, sehingga dapat menimbulkan fagosit pada paru. Hal ini diindikasikan dengan peningkatan keluhan kondisi penderita ISPA di beberapa puskesmas, klinik kesehatan atau melalui petugas kesehatan.

Mencermati hasil pengukuran kualitas udara (tabel 4.1) pada kegiatan pertambangan di PT. Aurtmin Indonesia Site Satui, memperlihatkan bahwa kadar debu di sepanjang jalan angkutan, pelsus dan lokasi tambang yang sedang beroperasi sebagian besar diatas baku mutu menurut PP. No. 41 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Udara Ambien Nasional. Sedangkan kandungan CO₂, SO_x dan NO_x masih berada dibawah baku mutu. Tingginya kadar debu pada beberapa lokasi pemantauan bisa disebabkan pemantauan dilakukan pada musim kering/kemarau sehingga jalan angkut dan sekitar tambang menjadi cepat kering walaupun telah dilakukan penyiraman. Sumber lain dari tingginya kadar debu yaitu berasal dari penumpukan batubara dan peremukan batubara pada *Crusher Plant*.

Tabel 4.1. Hasil pengukuran dan analisa kualitas udara di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006

Parameter	Satuan	Lokasi Pengukuran					BM
		Pelus	Simpang Empat Sumpol	Kampung Pabilahan	Kampung Lokpadi	Pit Antasena	
Kelambaban	%	62	55	56	68	54	-
Debu	$\mu\text{gr}/\text{m}^3$	616.99	369.43	293.86	156.22	525.74	230
SO ₂	$\mu\text{gr}/\text{m}^3$	-	11.09	8.22	4.31	16.59	900
NO ₂	$\mu\text{gr}/\text{m}^3$	-	78.19	55.14	2.11	61.54	400
CO ₂	$\mu\text{gr}/\text{m}^3$	-	295.17	219.44	87.05	416.73	300

Sumber : Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Arutmin Indonesia Site Satui Triwulan IV Tahun 2006

Hasil pengukuran kebisingan pada beberapa lokasi kegiatan pertambangan batubara (Tabel 4.2. dan tabel 4.2.), memperlihatkan bahwa kebisingan pada beberapa lokasi di kawasan perumahan sebagian besar di atas baku mutu menurut Kepmen LH No. Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan. Sedangkan untuk kawasan industri, sebagian besar pada lokasi pemantauan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan. Kebisingan di atas 55 dBA untuk kawasan perumahan dan diatas 70 dBA untuk kawasan industri sudah dapat dianggap sebagai kebisingan yang perlu mendapat perhatian karena sudah mengganggu kenyamanan pendengaran. Kebisingan yang terukur pada masing-masing lokasi bersumber utama dari kegiatan pengangkutan batubara dan kegiatan tambang. Tingginya tingkat kebisingan juga sangat dipengaruhi oleh adanya kegiatan lalu lintas yaitu kegiatan jalan negara.

Tabel 4.2. Hasil pengukuran tingkat kebisingan pada kawasan Industri di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006

No.	Lokasi	Quarterly (Tahun 2006)				Baku Mutu
		I	II	III	IV	
1	Pit Abi manyu	-	-	-	56.92	70
2	Pit Antareja	-	-	-	56.18	70
3	Pit Yudhistira	45.6	66.02	67.94	-	70
4	Pit Antasena	-	-	-	61.54	70
5	Simp Underpass	64.1	68.88	67.65	-	70
6	Underpass	59.2	70.4	61.66	-	70
7	Pelabuhan Khusus Batubara	68.8	67.55	67.64	60.77	70

Tabel 4.3. Hasil pengukuran tingkat kebisingan pada kawasan perumahan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006

No	Lokasi	Kebisingan (Tahun 2006)				Baku Mutu
		I	II	III	IV	
1	Kampung Pabilahan	67.9	61.72	59.97	61.72	55
2	Kampung Lokpadi	47.9	45.39	47.21	-	55
3	Simpang Empat Sumpol	61.1	63.71	63.39	58.43	55

Sumber : Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. Arutmin Indonesia Site Satu Tahun 2006

Sumber lain menurunkan kualitas udara yang berasal dari sektor bangunan yaitu pembangunan ruko dan pemukiman baru yang memberi dampak terhadap peningkatan suhu perkotaan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Sedangkan pada sub sektor peternakan kotoran ternak menimbulkan bau yang tidak sedap dapat mencemari udara dan mengganggu pernafasan.



Gambar 4. Kondisi peningkatan kadar debu di lokasi tambang PT. Arutmin Indonesia Site Satu



Gambar 5. Penumpukan material batubara pada lokasi tambang PT. Dua Sahabat Jaya, Satu

4.4. Respon dan Kebijakan Yang Diambil

Untuk menghadapi akses yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi di sektor pertambangan, Pemerintah Kabupaten memberikan respon positif. Kebijakan yang dibuat harus mempehatikan aspek lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Setiap kegiatan ijin eksploitasi bahan tambang khususnya batubara dipersyaratkan membuat dokumen AMDAL atau UKL-UPL serta secara berkala melakukan pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang salah satu laporan utamanya adalah kegiatan pemantauan kualitas udara dengan parameter debu dan kebisingan. Selain membahas masalah sumber pencemaran juga mengenai dampak dan penanggulangan.

Secara umum ada beberapa upaya penanggulangan dampak menurunnya kualitas udara akibat tingginya kadar debu oleh pihak perusahaan adalah dengan melakukan penyiraman secara rutin (3 kali sehari) saat kemarau pada tempat-tempat yang berpotensi menghasilkan debu, baik dari hasil proses penambangan maupun proses pengangkutan batubara serta pada badan jalan khususnya di lingkungan pemukiman yang dilalui truk pengangkut batubara dan dengan menanam pohon di sekitar lokasi *Stock Pile* dan kantor sebagai *buffer* untuk membatasi penyebaran debu ke lingkungan luar. Sedangkan untuk mengurangi tingkat kebisingan adalah dengan cara melakukan perbaikan dan pemeliharaan mesin-mesin yang digunakan secara berkala serta dengan melakukan pengaturan iring-iringan dan membatasi kecepatan truk pengangkut, khususnya ketika melintasi jalan negara dan daerah pemukiman.

Tindakan lain yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam merespon pencemaran udara khususnya debu pada musim kemarau antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembukaan lahan dan hutan dengan cara membakar
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengendalian pencemaran udara
3. Menegaskan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan agar dalam langkah kegiatannya tetap menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara

5. Menindak tegas pelaku usaha atau anggota masyarakat yang melanggar ketentuan sehingga menimbulkan pencemaran udara
6. Melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran dan potensi emisinya.

-

BAB V

LAHAN DAN HUTAN

5.1. Kondisi Lahan dan Hutan

Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mutu kehidupan dan penghidupan seluruh rakyat Indonesia. Dalam proses pembangunan itu sendiri di satu pihak menghadapi masalah karena jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dan persebarannya tidak merata, di lain pihak ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang akan berakibat pada tekanan terhadap sumber daya alam itu sendiri.

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dalam meningkatkan devisa atau pendapatan asli daerah, maka baik pemerintah maupun pemerintah daerah melakukan kebijakan pembangunan di berbagai sektor, yaitu di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan dan pariwisata. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan cara membuka kawasan-kawasan hutan menjadi kawasan budidaya yang dalam proses pelaksanaannya kegiatannya rawan terjadinya perubahan ekologi, kebakaran hutan dan lahan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Selatan, luas kawasan hutan menurut fungsinya \pm 324.932 Ha, meliputi Kawasan Konservasi (Cagar Alam) \pm 10.777 Ha, Hutan Lindung \pm 75.196 Ha dan Hutan Produksi \pm 238.959 Ha. Kondisi kawasan hutan tersebut, setiap saat terjadi kerusakan hutan dan lahan dengan tingkat kerusakan yang sangat mengkhawatirkan dan degradasi hutan dan lahan terus mengalami peningkatan yang signifikan dan perubahan status hutan dan lahan akan terus menerus mengalami peningkatan.

5.2. Penyebab Kerusakan Lahan dan Hutan

Sumber tekanan terhadap kualitas lingkungan aktifitas masyarakat umumnya berhubungan langsung dengan mata pencaharian dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup warga masyarakat, sesuai dengan lapangan usaha yang tersedia atau dapat dimanfaatkan oleh perorangan maupun

kelompok masyarakat dari sumberdaya dan lingkungannya yang umumnya merupakan aktifitas/kegiatan yang tidak secara langsung dikendalikan oleh kebijakan pemerintah.

Sumber tekanan terhadap lingkungan dari aktifitas pembangunan umumnya merupakan kegiatan yang secara langsung dipengaruhi/dikendalikan oleh kebijakan pemerintah. Sumber tekanan ini umumnya terpusat atau mengelompok dimana kegiatan pembangunan tersebut dilaksanakan. Berbagai bentuk aktifitas pembangunan yang dapat menjadi sumber tekanan bagi kelestarian lingkungan ini adalah seperti aktifitas pertanian dalam skala menengah dan besar, kehutanan, industri CPO, pertambangan batubara, pertambangan bijih besi, maupun proyek-proyek pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan dampaknegatif terhadap lingkungan.

Kerusakan lahan dan hutan dan tahun ke tahun bukannya menurun, tetapi sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat di Indonesia tentang arti pentingnya konservasi hutan dan lahan dalam menjaga stabilitas ekosistem dan ekologi lingkungan.

Ada beberapa factor penyebab lajunya kerusakan lahan. dan hutan di Kabupaten Tanah Bumbu khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya, diantaranya yaitu :

1. Kebakaran hutan dan lahan

Merupakan salah satu faktor penting penyebab kerusakan hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu. Kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun dan selalu berulang-ulang dan dampaknya hampir serupa dengan kejadian tahun sebelumnya. Kebakaran masih banyak terjadi di areal perusahaan HPH/HTI dan perkebunan dibandingkan areal milik masyarakat.

2. Penebangan ilegal

Penurunan luas hutan Kalimantan dan Indonesia masih akan terus berlanjut mengingat dalam lima tahun terakhir kebutuhan bahan baku industri kayu secara perlahan terus meningkat sementara kayu semakin sulit diperoleh. sehingga kayu yang digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut berasal dan kegiatan penebangan yang dilakukan secara ilegal (*illegal logging*).

3. Konversi Hutan

Pengubahan fungsi kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan atau tukar-menukar kawasan akan menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, khususnya konversi hutan menjadi perkebunan, pertanian, pertambangan dan pemukiman serta transmigrasi cenderung semakin meningkat. Dalam konversi tersebut rawan terhadap kerusakan hutan dan lahan, sebab kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah mengubah fungsi hutan dengan cara membuka kawasan hutan secara besar-besaran sehingga vegetasi yang ada ditebang untuk digantikan dengan varietas yang lama.

5.3. Dampak Terjadinya Kerusakan Hutan dan Lahan

Tingkat kerusakan hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu memperlihatkan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1. Tingkat Kekritisan hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu

No	Fungsi Kawasan	Kekritisan Lahan (Ha)					Jumlah (Ha)
		Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
1.	Kawasan Lindung						
	Hutan Lindung	6.459,7	342,06	66.716,60	34.095,57	-	107.613,93
	Suka Alam	38,94	656,45	3.133,40	-	-	3.828,79
2.	Kawasan Lindung Di Luar Kawasan Hutan **	-	-	-	43,76	-	43,76
3.	Kawasan Budidaya						
	Hutan Produksi	5.155,55	7.746,28	102.205,83	9.395,31	-	128.502,98
	Hutan Produksi Konversi	-	623,15	9.666,69	116,77	-	10.406,62
	Hutan Produksi Terbatas	15.563,14	489,93	24.653,75	6.249,54	-	46.956,36
	Kawasan Budi daya	-	-	-	-	-	-
	Tanaman Perkebunan	1.680,36	13.817,30	109.184,78	224,04	-	124.906,48
	Kawasan Budi-daya Tanaman	-	-	-	-	-	-
	Pertanian Lahan Basah	4.043,42	4.390,60	13.336,47	-	-	21.770,48
	Pertanian Lahan Kering	-	3.270,74	35.532,04	-	-	39.252,79
	Kawasan Industri	-	936,47	10.956,20	-	-	11.892,67
Kawasan Pemukiman	2.259,64	1.405,64	3.041,59	392,24	-	7.142,88	
	Jumlah	35.200,74	34.128,64	382.427,37	50.517,24	-	502.273,99

Sumber : Balai Pengelaaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan.

Akibat yang ditimbulkan dari kerusakan hutan dan lahan, antara lain : Penurunan struktur tanah dan ekosistem, perusakan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati (plasma nutfah), penyempitan daerah tangkapan air (DTA), pendangkalan air sungai, erosi dan sedimentasi, meningkatnya breeding place, penambahan luas lahan kritis dan terjadinya banjir. Akibat lain yang dirasakan oleh masyarakat baik yang ada di sekitar hutan maupun di luar kawasan hutan, diantaranya adanya banjir baik daerah rawan banjir maupun yang belum tersentuh banjir. Bencana asap akibat pembakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas manusia baik industri, bisnis maupun bidang lainnya, hal ini merupakan akibat dan ulah manusia itu sendiri.

Berbagai dampak tersebut di atas merupakan akibat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, sedangkan yang tidak dirasakan secara langsung berupa terjadinya tingkat erosi yang lebih tinggi yang berakibat tanah kehilangan sifat plastisnya, penurunan porositas dan irifiltrasi tanah, berkurangnya daya tangkap tanah terhadap air, terjadinya perubahan pH tanah secara drastis, keseimbangan unsur hara terganggu. Semua ini akan terasa setelah beberapa tahun kemudian dan akan lebih mengalami kerusakan secara global.



Gambar 6. Kondisi Lahan Terganggu Akibat Aktivitas Tambang

5.4. Respon dan Kebijakan Yang Diambil

Dalam menanggulangi meluasnya kerusakan lahan dan hutan dalam upaya merestorasi fungsi lahan dan hutan di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Daerah melakukan upaya merehabilitasi lahan dan hutan yang rusak, melakukan reboisasi pada LOA (*land over area*) atau areal kosong dan terlantar, mengatur perijinan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Kebijakan dalam mengurangi kebakaran lahan dan hutan baik oleh masyarakat maupun pihak perusahaan, pemerintah daerah melakukan pengawasan secara intensif aktivitas pembukaan lahan dengan mengeluarkan aturan mengenai pembakaran lahan dan hutan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi hutan dan lahan, upaya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengendalian kebakaran hutan, melakukan upaya pemadaman kebakaran pada lahan dan hutan yang terbakar.

Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu serta berbagai komponen usaha dan masyarakat yang ada telah melakukan beberapa upaya untuk mengendalikan lajunya kerusakan lahan dan hutan melalui berbagai program, antara lain :

1. Program Rehabilitasi Hutan/Lahan

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Tanah Bumbu masih menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, antara lain : realisasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan masih belum sebanding dengan luas lahan kritis yang ada, kegiatan perambahan hutan oleh pertanian masyarakat lokal, illegal logging dan illegal mining yang secara tidak langsung akan menambah luasan lahan kritis belum dapat diatasi secara nyata serta partisipasi masyarakat yang masih belum mendukung kegiatan rehabilitasi tersebut. Dalam upaya rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan daerah, maka pemerintah melakukan kegiatan penghijauan di wilayah pemukiman dengan pendistribusian bibit tanaman buah-buahan.

Tertlepas dari kendala dan permasalahan tersebut di atas Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu dengan Departemen Kehutanan akan terus berupaya dan berusaha merehabilitasi lahan kritis yang ada dengan menerapkan berbagai pola pendekatan yang pada intinya akan memberdayakan masyarakat sekitar hutan, sehingga kerusakan hutan dan lahan dapat ditanggulangi secara bertahap.

Realisasi kegiatan rehabilitasi hutan/lahan melalui kegiatan Reboisasi dan Penghijauan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus – Dana Reboisasi (DAK-DR) dan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dengan sumber dana APBN.

Realisasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilaksanakan melalui kegiatan Reboisasi dan Penghijauan yang bersumber dana dari DAK-DR serta Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) yang bersumber dana dari APBN, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2. Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus– Dana Reboisasi (DAK-DR) Tahun Anggaran 2006 - 2007

No	Lokasi	Tahun 2006		Tahun 2007	
		Luas Lahan Tertanami (Ha)	Jenis Bibit	Luas Lahan Tertanami (Ha)	Jenis Bibit
1.	Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat (HR)				
	Ds. Mangkalapi (Kec. Kusan Hulu)	25	Jati, Karet	-	Jati, Karet
	Ds. Guntung (Kec. Kusan Hulu)	50	Jati, Karet	-	Jati, Karet
	Ds. Sari Mulya (Kec. Surgai Loban)	-	Jati, Karet	-	Jati, Karet
	Ds. Sekapuk (Kec. Satui)	25	Jati, Karet	-	Jati, Karet
	Ds. Betung (Kec. Kusan Hilir)	Jati, Karet	Jati, Karet	-	Jati, Karet
2.	Kegiatan Pengkayaan Tanaman Hutan Produksi (HP)				
	Ds. Jombang (Kec. Satui)	100	Mahoni, Kuku	-	Mahoni, Kuku
3.	Kegiatan Reboisasi Hutan Produksi (HP)				
	Ds. Mangkalapi (Kec. Kusan Hulu)	-	Meranti, Sungkai	-	Meranti, Sungkai
	Ds. Jombang (Kec. Satui)	75	Mahoni, Kuku	-	Mahoni, Kuku

Tabel 5.3. Pelaksanaan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2006-2007

No.	Lokasi	Tahun 2006		Tahun 2007		Jenis Bibit
		Rencana (Ha/Unit)	Realisasi (Ha/Unit)	Rencana (Ha/Unit)	Realisasi (Ha/Unit)	
1. Kegiatan Penanaman pada Hutan Produksi (HP)						
1.	Ds. Mangkalapi (Kec. Kusan Hulu)	-	30	70	-	Jati, Mahori, sungkai
2. Kegiatan Pengkayaan pada Hutan Produksi (HP)						
2.	Ds. Mangkalapi (Kec. Kusan Hulu)	-	34	66	-	Sungkai, Gaharu
3. Kegiatan Penanaman pada Hutan Rakyat (HR)						
3.	Ds. Giri Mulya (Kec. Kusan Hulu)	-	75	-	-	Jati, Karet, Gaharu
	Ds. Teluk Kepayang (Kec. Kusan Hulu)	-	-	25	-	Jati, Mahori, Karet
	Ds. Guntur (Kec. Kusan Hulu)	-	-	50	-	Sengon, Mindi, Waru
	Ds. Anjir Baru (Kec. Kusan Hulu)	-	-	25	-	Sengon, Mindi, Waru
	Ds. Karang Intan (Kec. Kurarji)	-	-	25	-	Jati, Mahori, Karet
4. Kegiatan Pengkayaan pada Hutan Rakyat (HR)						
4.	Ds. Teluk Kepayang (Kec. Kusan Hulu)	-	-	50	-	Jati, Mahori, Karet
	Ds. Guntur (Kec. Kusan Hulu)	-	-	50	-	Sengon, Mindi, Waru
	Ds. Anjir Baru (Kec. Kusan Hulu)	-	-	100	-	Sengon, Mindi, Waru
	Ds. Karang Intan (Kec. Kurarji)	-	-	100	-	Sengon, Mindi, Waru
5. Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove						
5.	Kecamatan Kusan Hilir	-	-	150	-	Rhizophora Mucronata, Avicennia, Rhizophora Setulosia

2. Program Reboisasi dan Penghijauan

Program Reboisasi dan Penghijauan merupakan program yang bertujuan untuk menciptakan keteduhan serta keindahan kota. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan melalui kegiatan berikut :

- Menanami kiri kanan jalan dan fasilitas umum
- Bantuan bibit jenis tanaman Angsana, Bunga Tanjung, Mahoni, Glodokan Pohon, Ketapang dan bibit buah-buahan (durian okulasi, mangga okulasi, rambutan okulasi dan sukun) untuk kegiatan penghijauan di lingkungan sekolah/kampus/kantor/ rumah sakit/desa.

Dengan kegiatan ini akan menimbulkan dampak positif bagi lingkungan yaitu membantu mengendalikan kenaikan suhu udara daerah perkotaan.



Gambar 7. Pembibitan Sengon Untuk Kegiatan Penghijauan

3. Program Pengelolaan Pertambangan Berwawasan Lingkungan

Untuk menghadapi akses yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi di sektor pertambangan, pemerintah kabupaten memberikan respon positif. Kebijakan yang dibuat harus memperhatikan aspek lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Setiap kegiatan ijin eksploitasi bahan tambang khususnya batubara dipersyaratkan membuat dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

4. Program Pengelolaan Limbah

Dari hasil pengamatan, limbah pertanian, peternakan, industri perkebunan dan limbah domestik, sekarang ini sudah mulai dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Karena pada industri pengolahan kelapa sawit sudah melaksanakan pengkajian dan pemanfaatan limbah cair kepala sawit di perkebunan. Pemanfaatan ini tentunya akan dapat menjamin kelestarian lingkungan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan petani khususnya dan pencapaian tujuan 4R (Reduce, Recycle, Reuse & Recovery).

5. Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana maupun peran serta dan kepeloporan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam berbagai kegiatan yaitu :

- Peningkatan sarana pengelolaan lingkungan hidup daerah, melalui upaya pengadaan sarana pemantauan yaitu pengadaan alat ukur kualitas air.
- Peningkatan sumberdaya manusia/aparatur pemerintah di bidang lingkungan hidup, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga secara berkala menyertakan aparatur pemerintah kabupaten yang terkait dalam berbagai kursus/pelatihan di bidang lingkungan hidup seperti pelatihan AMDAL, PPLH, dan lain-lain.
- Penilaian pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL bagi kegiatan/aktifitas masyarakat dan pembangunan daerah

6. Program Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan

Program ini bertujuan untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap dalam kondisi yang dipersyaratkan serta dan mengantisipasi dampak negatif yang muncul dari berbagai aktifitas masyarakat dan kegiatan pembangunan.

Program ini dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berikut :

- Pemantauan berkala kualitas lingkungan hidup daerah
- Pembinaan dan pengawasan pemulihan kualitas lingkungan hidup daerah dan kualitas limbah industri.

Upaya-upaya pengendalian dan pemantauan dampak negatif aktifitas masyarakat dan pembangunan daerah yang telah dilakukan masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan keterbatasan dana dan sarana prasarana yang diperlukan. Untuk tahun-tahun yang akan datang diharapkan upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara maksimal.

Dalam menanggulangi meluasnya kerusakan lahan dan hutan dalam upaya merestorasi fungsi lahan dan hutan di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Daerah melakukan upaya merehabilitasi lahan dan hutan yang rusak, melakukan reboisasi pada LOA (*land over area*) atau areal kosong dan terlantar, mengatur perijinan alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan. Kebijakan dalam mengurangi kebakaran lahan dan hutan baik oleh masyarakat maupun pihak perusahaan, pemerintah daerah melakukan pengawasan secara intensif aktivitas pembukaan lahan dengan mengeluarkan aturan mengenai pembakaran lahan dan hutan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang konservasi hutan dan lahan, upaya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengendalian kebakaran hutan, melakukan upaya pemadaman kebakaran pada lahan dan hutan yang terbakar.

BAB VI

KEANEKARAGAMAN HAYATI

6.1. Kondisi Keaneekaragaman Hayati

Keaneekaragaman hayati merupakan bagian yang secara ekologis berperan penentu keseimbangan ekosistem yang bagi kehidupan, terutama dalam penyediaan kebutuhan keanekaan bahan hayati dan penyediaan jasa lainnya yang merupakan salah satu penopang utama kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.

Keaneekaragaman hayati adalah keadaan beragamnya ekosistem, jenis dan variabilitas genetik binatang, tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme yang hidup. Setiap individu organisme mengandung ribuan gen dengan kombinasi yang unik, sementara jenis atau spesies terdiri dari banyak organisme. Ekosistem merupakan kumpulan dan banyak spesies yang berinteraksi satu sama lainnya dengan lingkungan fisik.

Atas dasar itu pelestarian keaneekaragaman hayati menjadi penting demi termanfaatkannya keaneekaragaman hayati secara benar dan berkelanjutan. Kenyataannya sekarang masih belum terlaksana dengan baik, mengingat ancaman yang dihadapi sangat rumit dan sulit diatasi. Ancaman yang dihadapi dalam pelestarian keaneekaragaman hayati diantaranya adalah pengaruh perubahan iklim, eksploitasi yang berlebihan atau kegiatan yang mengakibatkan fisik penopang kehidupan, pencemaran, kehadiran spesies asing yang invasif, kegiatan pembudidayaan yang tidak disertai upaya yang menjamin kelestarian berbagai varietas dan spesies yang dibudidayakan.

Berdasarkan data keaneekaragaman hayati dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, bahwa di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu terdapat 64 (enam puluh empat) jenis flora langka/yang dilindungi dan 54 (lima puluh empat) jenis fauna langka/yang dilindungi. Sebelum adanya aktifitas eksplorasi / eksploitasi sumber daya alam dan kegiatan pembangunan, masih tersedia habitat bagi flora dan fauna sebagai tempat hidup dan berkembang biak. Tetapi setelah adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, menyebabkan keberadaan flora dan fauna kehilangan habitatnya, sehingga banyak flora dan fauna langka yang musnah.

6.2. Penyebab Menurunnya Keanekaragaman Hayati

Ada beberapa factor penyebab menurunnya jenis flora dan fauna langka/dilindungi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :

1. Hilangnya habitat tempat tumbuh dan berkembang biaknya jenis flora dan fauna, akibat maraknya kegiatan pertambangan, pembukaan lahan untuk keperluan areal tambang batubara, perkebunan, areal penimbunan tanah puuk, pembangunan sarana dan prasarana penambangan, serta aktifitas operasional peralatan yang tidak terkendali.
2. Meningkatnya perburuan satwa (langka/yang dilindungi) baik untuk keperluan konsumsi maupun komersial. Hal tersebut diatas juga dapat diakibatkan karena terganggunya satwa dengan berbagai aktivitas fisik, terutama bunyi mesin di lokasi pertambangan dan jalur angkutan, sehingga menurunkan potensinya untuk hidup dan berkembang biak secara normal.
3. Meningkatnya penebangan liar (illegal logging), terhadap jenis tanaman langka/yang dilindungi baik untuk keperluan konsumsi maupun komersial.

6.3. Dampak Menurunnya keanekaragaman hayati

Aktifitas pada sektor kehutanan oleh masyarakat, berdampak pada kerusakan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati (plasma nutfah). Tipe hutan yang tersusun secara berurutan menyebabkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar tersendiri. Tetapi pada kenyataannya hutan sebagai habitat dari sumber daya hayati, sekarang telah mengalami gangguan berat dari berbagai arah sehingga terus mengalami kerusakan. Konversi kawasan hutan untuk perkebunan sawit, pertambangan mineral/galian C, perburuan liar, dsb turut mempersempit habitat, ruang gerak dan berkembangbiaknya flora dan fauna serta perubahan ekosistem alam menuju pemusnahan keanekaragaman plasma nutfah yang mengakibatkan berkurangnya *biodiversity* baik flora maupun fauna yang ada di hutan tersebut sehingga terjadinya perubahan dan pengurangan varietas, kepunahan spesies dan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem.

Salah satu dampak yang diakibatkan dari berkurangnya jenis flora dan fauna adalah terganggunya keseimbangan ekosistem bagi kehidupan, terutama dalam penyediaan kebutuhan keanekaan bahan hayati dan penyediaan jasa lainnya yang merupakan salah satu penopang utama kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia.

6.4. Respon dan Kebijakan Yang Diam bil

Untuk mendukung tercapainya pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu secara berkelanjutan diharapkan pengambil keputusan dan pihak terkait lainnya lebih meningkatkan upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati secara bijaksana, lestari, pengembangan nilai manfaat (*Utility value*) pengelolaan konservasi dan meningkatkan kesadaran serta peran masyarakat. Beberapa upaya nyata yang perlu dilakukan demi menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di Kabupaten Tanah Bumbu, diantaranya adalah :

- Pada areal pertambangan yaitu dengan membatasi pembukaan lahan tambang hanya sebatas yang diperlukan dalam batas wilayah pinjam pakai.
- Melakukan reklamasi dan revegetasi pada daerah yang selesai ditambang sesegera mungkin
- Mengendalikan erosi dan mengembalikan kesuburan tanah yang terganggu
- Membantu pengupayaan konservasi jenis-jenis flora dan fauna endemik, langka dan dilindungi yang dijumpai pada kawasan tertentu oleh Instansi terkait sebagai bagian program pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan

BAB VII PESISIR DAN LAUT

7.1. Kondisi Umum Pesisir dan Laut

Sebagian besar Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu berada di sekitar wilayah laut dan pesisir. Hal ini juga mempengaruhi mata pencaharian penduduk yang banyak menggantungkan hidup dari hasil laut dengan menjadi nelayan atau petani kolam/tambak. Dari 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, 6 (enam) Kecamatan diantaranya berada di sekitar pesisir dan laut dengan jumlah desa 28 (duapuluh delapan). Jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 4.284 jiwa dan 1.295 jiwa lainnya adalah petani kolam/tambak (Tabel 7.1.)

Tabel 7.1. Kependudukan di Laut dan Pesisir

No	Kecamatan/Kabupaten (Terletak di Pesisir)	Jumlah Desa Pesisir	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian(jiwa)		
					Nelayan	Petani	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kusan Hilir	12			2.673	68	
2	Satu	4			462	604	
3	Kusan Hulu	-			-	-	
4	Karang Bintang	-			-	-	
5	Sungai Loban	5			458	543	
6	Kuranji	-			-	-	
7	Angsana	1			49	-	
8	Mantewe	-			-	-	
9	Bat ulicin	3			642	67	
10	Simpang Empat	3			-	13	
	Total	28			4.284	1.295	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu

Secara umum kondisi kawasan pesisir dan laut di Kabupaten Tanah Bumbu belum terindikasi pencemaran akibat industri atau kegiatan usaha lainnya, tetapi potensi kerusakan yang terjadi di pesisir dan laut sudah mulai terlihat, diantaranya kerusakan ekosistem bakau (mangrove) akibat adanya pembukaan areal tambak rakyat yang tak terkendali, serta kerusakan pesisir dan laut lainnya.

7.2. Penyebab Kerusakan Pesisir dan Laut

Kerusakan pesisir dan pantai di Kabupaten Tanah Bumbu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Kerusakan hutan bakau (*mangroove*), akibat pembuatan kolam dan tambak di wilayah pesisir. Hal ini terlihat jelas dengan luasnya pembukaan lahan/hutan mangrove untuk usaha tambak dan kolam tanpa disertai dengan upaya reklamasi.
2. Terjadinya erosi dan sedimentasi, akibat penggundulan hutan di daerah hulu dan kegiatan pengembangan di daerah pantai yang tidak mengindahkan dinamika pantai, kegiatan kehutanan yang sering menggunakan sungai sebagai transportasi untuk mendistribusikan hasil-hasil kayunya dan kegiatan pertambangan liar (*illegal minning*) yang menggunakan merkuri yang di buang ke sungai dan akhirnya sampai ke laut akan menyebabkan polusi bagi ekosistem laut.
3. Terganggunya ekosistem hutan dan biota perairan, akibat dari pembuatan tambak di dalam sempadan pantai/sungai, pengambilan kayu mangrove dan pengrusakan mangrove akibat penambatan kapal tongkang di kawasan cagar alam, penambangan pasir pantai/sungai serta pembangunan sarana prasarana pelabuhan khusus. Dampak utama yang ditimbulkan dari keberadaan pengoperasian pelabuhan khusus/pelabuhan pemuatan berupa peningkatan laju abrasi di bibir pantai sekitar lokasi tambatnya tongkang atau boat.
4. Terganggunya ekosistem biota perairan dan kebisingan bagi fauna sekitarnya, akibat meningkatnya aktifitas lalu lintas air dan adanya cecekan minyak
5. Pembangunan sarana prasarana pelabuhan khusus yang kurang memperhatikan tata ruang, sehingga kawasan konservasi khususnya terumbu karang di Desa Bunati Kecamatan Angsana dan Desa Sei. Loban Kecamatan Sei. Loban kurang terlindungi. Hal ini antara lain oleh kebijakan yang masih bersifat sentralistik dan RTRW Provinsi yang perlu direvisi. Berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Bumbu bahwa kawasan pelabuhan berada pada Kecamatan Batulicin (Desa Sei. Dua) dan Kecamatan Satui (Desa Sei. Danau). Sedangkan peningkatan kasus tabrakan tongkang dengan bagan nelayan merupakan salah satu akibat dari kurangnya disiplinnya penggunaan jalur pelayaran angkutan tongkang.

6. Pembuangan limbah rumah tangga, industri, dan lain-lain, yang tidak mengikuti kaidah lingkungan menyebabkan air laut mudah tercemar, kegiatan pelabuhan dan kapal nelayan yang sering keluar masuk menuju laut berpotensi untuk menimbulkan polusi terutama yang disebabkan oleh tumpahan minyak kapal-kapal tersebut.

7.3. Dampak terjadinya kerusakan Pesisir dan Laut

Beberapa dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari kerusakan pesisir dan laut di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :

1. Terjadinya abrasi dipesisir, karena kerusakan hutan bakau (mangrove) akibat adanya pembukaan areal tambak rakyat yang tak terkendali, tanpa disertai upaya reklamasi.

Tabel 7.2. Abrasi pesisir dan usaha kegiatan reklamasi

No.	Lokasi	Luas (Ha)	
		Abrasi	Reklamasi
1	2	3	4
1	Kecamatan Simpang Empat	1.604,5 Ha	-
2	Kecamatan Batulicin	675,1 Ha	7,05
3	Kecamatan Kusan Hilir	687 Ha	-
4	Kecamatan Sungai Loban	870 Ha	-
Jumlah		3836,6	7,05

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu

2. Akibat dari kerusakan hutan bakau/mangrove tersebut juga dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem perairan, berpindahnya ground fishing, berkurangnya tempat berlindung dan bertelur ikan, udang dan kepiting. Hal ini berdampak pada pendapatan masyarakat khususnya masyarakat petani nelayan.
3. Adanya keluhan masyarakat tentang tingginya kadar timbal (Pb) di tambak, juga merupakan adanya indikasi perubahan lingkungan dan frekwensi kegagalan panen ikan di sekitar tambak maupun di saluran pembuangan telah mengandung timbal (Pb) dan cadmium (Cd).

7.4. Respon dan Kebijakan yang diambil

Beberapa upaya penanggulangan dampak kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi aktifitas pembukaan tambak serta pembinaan pola tambak yang ramah lingkungan, upaya ini dilakukan dengan pengaturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang ditunjang oleh peningkatan upaya pembinaan teknis untuk pengembangan produksi perikanan dari areal pertambakan yang telah ada.
2. Tidak lagi mengijinkan pembuatan tambak baru dan mengembangkan budidaya keramba, mulai menanam kembali hutan mangrove yang rusak dan membentuk Kelompok Peduli Hutan Mangrove.
3. Pembuatan revertment di sepanjang bibir pantai pada area perairan pelabuhan pemuatan atau pelabuhan khusus untuk mengurangi peningkatan laju abrasi.
4. Usaha penanggulangan kerusakan/pencemaran yaitu dengan pengurangan buangan limbah yang masuk pesisir dengan cara pemanfaatan teknologi bersih (*clean technology atau low and no waste technologies*).
5. Usaha penanggulangan kerusakan akibat degradasi fisik dan habitat *mangroove* dengan cara merehabilitasi hutan *mangroove* yang rusak melalui penghijauan
6. Usaha penanggulangan erosi pantai yaitu melalui peremajaan pantai dan merehabilitasi ekosistem mangroove.
7. Melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pengkajian pengelolaan sumberdaya dan pemulihan ekosistem pesisir, dan laut, sehingga pembangunan dan pemanfaatannya berbasis masyarakat dan sesuai dengan daya dukung lingkungan yang ada.

BAB VIII

AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Memperhatikan berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu, upaya pengendalian dampak lingkungan hidup daerah sebaiknya dikonsentrasikan pada sektor kegiatan yang menjadi sumber dampak tersebut, di samping itu juga melaksanakan program-program dalam rangka pengendalian dampak lingkungan lainnya yang meliputi :

8.1. Pengendalian Dampak Lingkungan pada Sektor Pertanian

Pengendalian dampak lingkungan hidup pada sektor pertanian meliputi sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan, dan sub sektor peternakan melalui upaya-upaya berikut :

Pada sub sektor perkebunan upaya pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan yaitu :

- Upaya pengendalian aktifitas pembukaan lahan dan pelaksanaan kewajiban konservasi lahan
- Tindakan revegetasi dan upaya-upaya perlindungan lahan
- Dalam pengembangan areal perkebunan hendaknya juga memperhatikan faktor yang berkaitan dengan daya dukung lahan seperti aspek kelerengan lahan, daerah resapan air dan aspek kesesuaian lahan lainnya,
- Membentuk Tim Petugas Pengawas Pestisida dan Pupuk Kabupaten Tanah Bumbu
- Pembinaan, pengawasan, pengelolaan limbah industri melalui pelaksanaan perizinan pemanfaatan limbah cair minyak kelapa sawit (LA) dan pengamanan pemantauan lingkungan industri secara berkala.

Pada sub sektor perikanan, pengendalian lingkungan dilaksanakan melalui upaya-upaya berikut :

- Pengendalian aktifitas pembukaan tambak serta pembinaan pola tambak yang ramah lingkungan, upaya ini dilakukan dengan pengaturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir yang ditunjang oleh peningkatan upaya pembinaan teknis untuk pengembangan produksi perikanan dari areal pertambakan yang telah ada.

- Tidak lagi mengizinkan pembuatan tambak baru dan mengembangkan budidaya keramba, mulai menanam kembali hutan mangrove yang rusak dan membentuk Kelompok Peduli Hutan Mangrove.

Pada sub sektor peternakan, pengendalian lingkungan dilaksanakan melalui upaya peningkatan pengelolaan limbah peternakan, khususnya pada daerah-daerah yang menjadi sentra pengembangan ternak. Dalam pelaksanaannya, agar limbah organik yang berasal dari aktifitas peternakan dapat dipadukan dengan pengembangan aktifitas perkebunan yang berdekatan dengan sentra pengembangan ternak.

8.2. Pengendalian Dampak Lingkungan pada Sektor Kehutanan

Pengendalian dampak lingkungan hidup pada sektor kehutanan melalui upaya-upaya berikut :

- Pada sektor ini sampai sekarang telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan yaitu melalui kegiatan GERHAN yang bersumber dari dana APBN dan DAK-DR yang bersumber dari Dana APBN melalui kasdaerah.
- Peningkatan pengamanan hutan dan hasil hutan serta pengendalian laju deforestasi akibat perambahan hutan maupun aktifitas pembukaan kawasan hutan melalui kegiatan patroli pengaman dan perlindungan hutan.
- Pengetatan perijinan pemanfaatan hasil hutan dan pembinaan/pendampingan kepada stockholder

8.3. Pengendalian Dampak Lingkungan pada Sektor Pertambangan

Pengendalian dampak lingkungan hidup pada sektor pertambangan melalui upaya-upaya berikut :

- Perluanya menjadwalkan kegiatan reklamasi eks tambang secara konsisten dan simultan, mencegah/mengurangi masuknya sedimentasi ke sistem perairan utama, meningkatnya dampak positif reklamasi dan revegetasi, melaksanakan Prosedur Operasi Standar secara tepat dan melaksanakan/mengamankan tambang sesuai dengan kaidah pertambangan yang ramah lingkungan.
- Pengendalian dampak oleh aktifitas pertambangan skala besar, difokuskan pada peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan seperti AMDAL maupun UKL/UPL, selain itu untuk meningkatkan ketaatan dan evaluasi berkala

hasil pelaksanaan RKL dan RPL atau UKL dan UPL secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

- Pengendalian dampak lingkungan oleh aktifitas pertambangan skala kecil/pertambangan rakyat yaitu upaya penertiban dan instruksi teknologi pengelolaan lingkungan kepada pelaku kegiatan tambang, juga diperlukan upaya peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Upaya ini dapat ditempuh melalui pengembangan alternatif mata pencaharian masyarakat yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya setempat dan ditunjang pula oleh manajemen kependudukan untuk mengendalikan migrasi musiman pelaku kegiatan tambang skala kecil.
- Peran serta Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya penanggulangan dan penertiban illegal minning yaitu :

Preventif

- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP) melalui penambangan skala kecil yang legal
- Membina pemilik KP membuat kerjasama/MOU dengan pemilik stockfile/pelabuhan

Persuasif

- Bila Lokasi illegal minning berada di areal perusahaan lain (KP/PPKP2B) difasilitasi oleh Pem da untuk membentuk kemitraan melalui Perusda.
- Penundaan sementara penerbitan KP baru
- Melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang melalui pembinaan perkebunan dan pembentukan jaringan informasi

Refresif

- Melaporkan kegiatan illegal minning ke Kapolres setempat/Kapolda Kalsel/Kapolri
- Menjadi saksi ahli dalam proses penyelidikan dan pengadilan atas kasus illegal minning.

8.4. Pengendalian Dampak Lingkungan Pada Sektor Perhubungan

Pengendalian dampak lingkungan hidup pada sektor perhubungan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penataan jalur pelayaran, pemanfaatan penggunaan jalan angkut produksi dan melakukan koordinasi intensif dengan propinsi maupun instansi terkait di kabupaten sehubungan pembangunan sarana prasarana dan perijinan kepelabuhanan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanah Bumbu.

8.5. Pengendalian Dampak Lingkungan oleh Aktifitas Domestik Masyarakat

Pengendalian dampak lingkungan hidup oleh aktifitas domestik masyarakat melalui upaya-upaya berikut :

- Pengembangan pola hidup hemat energi, hemat sumberdaya, minimum waste dan pola hidup lainnya yang ramah lingkungan.
- Pemanfaatan pekarangan untuk tanam an buah-buahan dan tanaman obat keluarga (TOGA).
- Pengembangan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), peningkatan sarana angkutan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- Pengembangan aspek kelembagaan, melalui peningkatan kompetensi institusi pengelola lingkungan hidup daerah sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pembinaan dan pengawasan, hal ini sangat berpengaruh terhadap upaya pengendalian dampak secara dini, khususnya yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
- Pengembangan aspek manajemen pengelolaan lingkungan daerah diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja seluruh perangkat dan sumberdaya yang dimiliki. Salah satu upaya yang ditempuh adalah penyempurnaan mekanisme perijinan daerah dengan mengakomodasi berbagai upaya pengendalian dampak yang diperlukan, peningkatan koordinasi dan peran antar instansi terkait khususnya yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pemanfaatan sumberdaya alam, serta penerapan secara konsisten berbagai instrumen pengendalian dampak lingkungan pada seluruh sektor/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak.

8.6. Kegiatan-kegiatan dalam Upaya Pengendalian Lingkungan

Selain upaya-upaya berdasarkan sektor seperti tersebut di atas upaya pengendalian lingkungan juga dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

- Sektor lingkungan akan meningkatkan anggaran pembinaan melalui pengawasan, pemantauan dan evaluasi lingkungan.
- Perbaikan kualitas air, sudah mulai dilaksanakan Program Air Bersih melalui kegiatan pembuatan sumur sehat menggunakan dana APBD II dan pengambilan data indikator lingkungan kualitas air.
- Pengadaan sarana dan prasarana pengukuran kualitas air untuk melakukan pemantauan kualitas air pada DAS dan perusahaan yang didanai oleh APBD maupun APBN.

DAFTAR PUSTAKA

1. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu
2. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan PT. Arutmin Indonesia Site Satui Tahun 2006
3. Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan PT. Arutmin Indonesia Tambang Batulicin Tahun 2006

- Pengadaan sarana dan prasarana pengukuran kualitas udara yang didanai oleh APBD maupun APBN (TA 2008).
- Pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), dilakukan melalui kegiatan penghijauan kota dan fasilitas umum dan perencanaan pembangunan hutan kota (TA 2007).
- Pengawasan pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL dari aktifitas masyarakat dengan berbagai sektor kegiatan dan aktifitas pembangunan daerah.
- Data Dasar AMDAL belum dimiliki/valid sehingga diperlukan kegiatan inventarisasi kondisi lingkungan yang meliputi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap usaha/kegiatan pemanfaatan SDA harus direncanakan secara baik, simultan, konsisten dan komprehensif serta terbiayai dengan baik pula pada tahun anggaran yang akan datang.
- Efektifitas penanggulangan kegiatan illegal minning melalui peran serta pemerintah daerah turut menanggulangi dan menertibkan kegiatan illegal minning, sehingga tidak ada lagi kegiatan illegal minning di Kabupaten Tanah Bumbu
- Dalam rangka perbaikan lingkungan hidup di daerah bahwa tanggung jawab reklamasi khususnya di lahan eks. illegal minning dilakukan secara terkoordinasi oleh pemerintah kabupaten
- Sumber dana pelaksanaan reklamasi eks. illegal minning diupayakan dari royalti atau melalui kegiatan Community Development (CD)